

Dr. Gede Wirata, S. Sos., SH., M. AP



PENYUSUTAN LAHAN PERSAWAHAN

— DI KOTA DENPASAR —

PENYUSUTAN LAHAN PERSAWAHAN DI KOTA DENPASAR

Dr. GEDE WIRATA, S.Sos., SH., M.AP



pena persada
PENERBIT CV. PENA PERSADA

**PENYUSUTAN LAHAN PERSAWAHAN
DI KOTA DENPASAR**

Penulis:

Dr. Gede Wirata, S.Sos., SH., M.AP

ISBN: 978-623-315-303-4

Editor:

Wiwit Kurniawan

Design Cover:

Retnani Nur Brilliant

Layout:

Nisa Falahia

Penerbit CV. Pena Persada

Redaksi:

Jl. Gerilya No. 292 Purwokerto Selatan, Kab. Banyumas
Jawa Tengah

Email: penerbit.penapersada@gmail.com

Website: penapersada.com Phone: (0281) 7771388

Anggota IKAPI

All right reserved

Cetakan pertama: 2021

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang
memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin
penerbit

KATA PENGANTAR

Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas tuntunan dan penyertaan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul **“PENYUSUTAN LAHAN PERSAWAHAN DI KOTA DENPASAR”**. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan karya ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan banyak terima kasih pada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini. Sehingga buku ini bisa hadir di hadapan pembaca.

Dalam buku ini membahas mengenai proses alih fungsi lahan persawahan dan dinamika yang terjadinya karena alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar. Alih fungsi lahan pertanian khususnya persawahan untuk kepentingan non-pertanian seperti industri serta permukiman termasuk perkantoran dan sarana prasarana pariwisata yang terjadi terus menerus, mempunyai konsekuensi logis adalah budaya pertanian dengan sistem subaknya yang merupakan salah satu modal dasar pariwisata budaya Bali semakin terdegradasi, termasuk para petani yang belum siap untuk bersaing di dunia modern dan industri yang sangat kompetitif. Di sisi lain pariwisata dengan leluasa mengeksploitasi lahan pertanian untuk kepentingannya.

Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan guna penyempurnaan buku ini. Akhir kata saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Konsep Alih Fungsi Lahan	1
B. Lahan Persawahan.....	3
BAB II. LOKASI DAN DEMOGRAFI KECAMATAN	
DENPASAR SELATAN	5
A. Lokasi dan Geografi	5
B. Demografi Kecamatan Denpasar Selatan	7
1. Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin	7
2. Penduduk Berdasarkan Mata	
Pencarian/Pekerjaan	8
3. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	9
BAB III. SOSIAL BUDAYA DAN DINAMIKA ALIH FUNGSI	
LAHAN KECAMATAN DENPASAR SELATAN	11
A. Sosial Budaya Kecamatan Denpasar Selatan	11
1. Sistem Kemasyarakatan	11
2. Agama dan Kepercayaan.....	18
B. Dinamika Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan	
Denpasar Selatan.....	20
BAB IV. PROSES ALIH FUNGSI LAHAN PERSAWAHAN DI	
KECAMATAN DENPASAR SELATAN	25
A. Alih Fungsi Lahan Persawahan melalui Hegemoni	28
B. Alih Fungsi Lahan Persawahan melalui Negosiasi.....	55
C. Alih Fungsi Lahan Persawahan melalui Oposisi	72
DAFTAR PUSTAKA	87

BAB I.

PENDAULUAN

A. Konsep Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan berasal dari kata *conversion of land use*. *Conversion* sendiri menurut Liber (2009: 107) adalah perubahan. Dikaitkan dengan perubahan lahan yang berarti perubahan dalam penggunaan lahan maka *conversion of land use* diartikan sebagai alih fungsi lahan.

Alih fungsi lahan merupakan perubahan penggunaan lahan dari suatu fungsi lahan yang menjadi fungsi lahan lainnya. Alih fungsi lahan muncul sebagai akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah merubah struktur pemilikan dan penggunaan tanah secara terus menerus. Perkembangan struktur industri yang cukup pesat berakibat terkonversinya tanah pertanian secara besar-besaran. Selain untuk memenuhi kebutuhan industri, alih fungsi lahan pertanian juga terjadi secara cepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang jumlahnya jauh lebih besar (Husein 2005:13).

Alih fungsi lahan dapat terjadi disebabkan karena berubahnya nilai lahan (*rent*) yang menyebabkan lahan dapat memberikan manfaat kepada manusia, Harga lahan yang tinggi menyebabkan lahan tersebut cenderung digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan menguntungkan, jika pada awalnya suatu lahan digunakan untuk kegiatan yang kurang produktif, maka perubahan kegiatan yang dilakukan di atas lahan tersebut akan mempengaruhi nilai lahan menjadi lebih tinggi. Menurut Nasoetion (2003: 45), pada dasarnya lahan mempunyai lima jenis *rent*, yaitu:

1. *Rent ricardian*, yaitu *rent* yang timbul sebagai akibat adanya sifat kualitas tanah yang berhubungan dengan penggunaan tertentu dan atau kelangkaannya

2. *Rent* lokasi, yaitu *rent* yang timbul sebagai akibat dari lokasi suatu tanah relatif terhadap lokasi lainnya secara praktik berhubungan dengan aksesibilitas tanah.
3. *Rent* lingkungan, yaitu *rent* yang timbul sebagai akibat adanya fungsi ekologis tanah di dalam suatu ekosistem.
4. *Rent* sosial, yaitu *rent* yang timbul jika pemilikan penguasaan tanah menimbulkan sejumlah *privileges* (hak-hak istimewa) bagi pemilik penguasaannya.
5. *Rent* politik, yaitu *rent* yang timbul jika pemilikan-penguasaan tanah memberikan sejumlah kekuatan politik ataupun posisi politik yang lebih menguntungkan kepada pemilik penguasaannya.

Lahan sebagai komoditas mempunyai nilai atau harga tersendiri yang ditentukan berdasarkan parameter, yaitu: (1) tingkat produktifitas lahan itu sendiri; (2) lokasi atau letak lahan; dan (3) kegiatan yang berada di atasnya (Anitasari, 2008: 33). Penentuan nilai berdasarkan parameter tersebut di atas dapat menjadi salah satu alasan terjadinya alih fungsi lahan, sebab dengan terjadinya tingkat produktifitas suatu kegiatan yang dilakukan di atas lahan, akan menyebabkan kecenderungan untuk melakukan alih fungsi lahan ke bentuk lain agar produktifitasnya bertambah yang pada akhirnya akan meningkatkan nilai lahan tersebut. Nilai lahan dapat berubah seiring dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat pengelolaannya. Hal inilah yang menyebabkan berubahnya nilai lahan, sehingga pada akhirnya akan mendorong terjadinya alih fungsi lahan (Sukmawati, 2009: 52).

Nasoetion (2003: 71) menjelaskan sebab-sebab terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan akibat yang ditimbulkan. Pertumbuhan penduduk, kebijakan pemerintah dan faktor alami sebagai penyebab alih fungsi lahan. Akibat yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan pertanian adalah masalah produksi makanan, ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Sehingga akan timbul kelaparan, stok pangan berkurang, peningkatan biaya untuk pangan, polusi udara, keindahan berkurang, sumber daya alam rusak,

ketidakseimbangan penduduk dan tidak stabilnya masyarakat di daerah pedesaan.

B. Lahan Persawahan

Lahan persawahan adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan dan menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memperhatikan dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut (Jayadinata, 1999: 36). Menurut Irawan (2005: 71) lahan persawahan adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air. Menurut penulis lahan persawahan merupakan lahan pertanian yang dibuat dengan tujuan terutama untuk tanaman padi, akan tetapi dalam kenyataannya sehari-hari sawah sering juga ditanami secara bergiliran dengan palawija dan lain-lain.

Lahan sawah dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan pengairannya yaitu lahan sawah irigasi (teknis, setengah teknis, sederhana) dan lahan sawah non irigasi (tadah hujan, pasang surut, lebak, polder dan sawah lainnya). Lahan sawah irigasi teknis adalah lahan sawah yang mempunyai jaringan irigasi dimana saluran pemberi terpisah dari saluran agar penyediaan dan pembagian Lahan sawah adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan dan menyalurkan air, yang biasanya ditanami padi sawah tanpa memperhatikan dari mana diperolehnya atau status lahan tersebut dan air ke dalam lahan sawah tersebut dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah. Lahan sawah irigasi teknis adalah lahan sawah yang mempunyai irigasi dari irigasi setengah teknis. Lahan sawah irigasi sederhana adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi sederhana yang sebagian jaringannya dibangun oleh PU. Lahan sawah irigasi desa/non PU adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang dikelola sendiri oleh masyarakat (Pakpahan, 2003: 101).

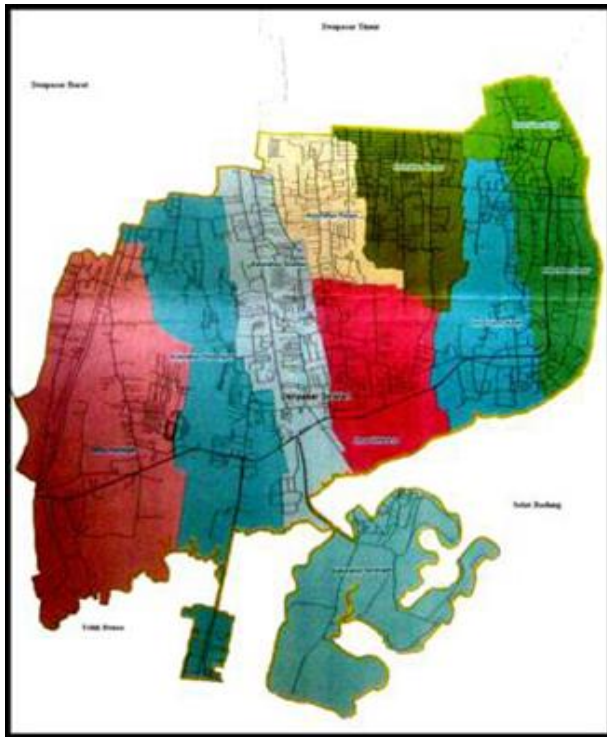
Lahan persawahan memiliki arti penting, yakni sebagai media aktivitas bercocok tanam guna menghasilkan bahan pangan pokok (khususnya padi) bagi kebutuhan umat manusia. Oleh sebab itu, lahan persawahan dapat dianggap sebagai barang publik, karena selain memberikan manfaat yang bersifat individual bagi pemiliknya, juga memberikan manfaat yang bersifat sosial. Lahan sawah memiliki fungsi yang sangat luas yang terkait dengan manfaat langsung, manfaat tidak langsung, dan manfaat bawaan. Manfaat langsung berhubungan dengan perihal penyediaan pangan, penyediaan kesempatan kerja, penyediaan sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah, sarana penumbuhan rasa kebersamaan sarana pelestarian kebudayaan tradisional, sarana pencegahan urbanisasi, serta sarana pariwisata. Manfaat tidak langsung terkait dengan fungsinya yaitu sebagai salah satu wahana pelestari lingkungan, sebagai sarana pendidikan, dan sarana untuk mempertahankan keragaman hayati.

BAB II.

LOKASI DAN DEMOGRAFI KECAMATAN DENPASAR SELATAN

A. Lokasi dan Geografi

Kecamatan Denpasar Selatan merupakan bagian dari wilayah Kota Denpasar dengan luas wilayah 49,99 Km², terbagi dalam 10 desa/kelurahan, dan 105 dusun/banjar. Sebagian besar desa/kelurahan di Kecamatan Denpasar Selatan merupakan desa/kelurahan pantai/pesisir yang jumlahnya mencapai 8 desa/kelurahan. Topografi daerah Kecamatan Denpasar Selatan adalah daerah pesisir/pantai dengan garis pantai yang indah sehingga sepanjang garis pantai tersebut dimanfaatkan sebagai sentra industri pariwisata utama di Kota Denpasar.



Gambar 2.1 Peta Wilayah Kecamatan Denpasar Selatan

Batas-batas Kecamatan Denpasar Selatan berbatasan dengan wilayah utara meliputi Denpasar Timur dan Denpasar Barat, Wilayah selatannya adalah Samudra Indonesia, wilayah timur Selat Badung, dan wilayah Barat Denpasar Barat dan Kuta yang merupakan wilayah Kabupaten Badung.

Statistik geografi dan iklim Kecamatan Denpasar Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Statistik Geografi dan Iklim

Uraian	Satuan	2014
Luas	Km ²	49,99
Suhu	°C	20,0-36,8
Kelembaban	%	77-81
Curah hujan	Mm	0,2-730,5
Desa pesisir	Desa/kel.	8
Desa bukan pesisir	Desa/kel.	2

Sumber: BMKG Wilayah III Denpasar

Berdasarkan tabel berikut di atas dapat dilihat suhu maksimum di Kecamatan Denpasar Selatan 36,8°C terjadi pada bulan Desember, dan suhu minimum di Kecamatan Denpasar Selatan 20,0°C pada bulan Juni, Juli, dan September. Kelembaban udara maksimum 81 persen terjadi pada bulan Desember, minimum 77 persen pada bulan Agustus. Curah hujan maksimum 730,5 mm pada bulan Januari, dan minimum 0,2 mm pada bulan Juni dan Agustus.

Berdasarkan luas wilayah menurut penggunaan, Kecamatan Denpasar Selatan terdiri atas tanah pemukiman seluas 324,00 ha/m², tanah persawahan seluas 847,00 ha/m², tanah perkebunan seluas 21,00 ha/m², tanah kuburan seluas 14,00 ha/m², tanah pekarangan seluas 2.699,00 ha/m², tanah pertanian seluas 163,00, tanah perkantoran seluas 17,82, dan tanah prasana umum seluas 934,90. Secara keseluruhan total luas tanah di Kecamatan Denpasar Selatan seluas 49,99.

Dengan keberkahan geografis yang dimilikinya, menjadikan Denpasar Selatan merupakan salah satu Kecamatan yang sangat maju dibandingkan Kecamatan lainnya di Kota Denpasar. Hal tersebut bisa dilihat dengan adanya destinasi-destinasi pariwisata yang terdapat di Denpasar Selatan. Destinasi pariwisata tersebut berupa pantai yang berada di sepanjang pesisir Denpasar Selatan, salah satunya destinasi pariwisata yang terkenal ialah Pantai Sanur. Hal tersebut pula semakin melengkapi dengan adanya kompleks-kompleks pertokoan dengan berbagai barang dagangan, rumah sakit, hotel kelas menengah maupun berbintang dan juga supermarket maupun minimarket. Dengan keadaan demikian, kehidupan masyarakat pun berubah. Perubahan yang terjadi bisa dilihat dari masyarakatnya, dimana semula merupakan masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern.

B. Demografi Kecamatan Denpasar Selatan

1. Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan data dari Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Denpasar akhir Tahun 2014 diketahui bahwa jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Denpasar Selatan adalah 266.420 orang, yang terdiri atas 136.090 orang laki-laki dan 130.330 orang berjenis kelamin perempuan. Secara terperinci tabel di bawah menggambarkan komposisi penduduk berdasarkan umur dan jenis kelamin.

Tabel 2.2
Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur (Tahun)	Total		
	Laki-laki (orang)	Perempuan (orang)	Jumlah (orang)
0 - 9	23.940	22.810	46.750
10 - 19	19.450	20.130	39.580
20 - 29	32.020	31.580	63.600
30 - 39	26.410	24.990	51.400
40 - 49	19.580	17.250	36.830
50 - 59	9.320	8.200	17.520
60 - 69	3.770	3.480	7.250
70 - keatas	1.600	1.890	3.490
Jumlah	136.090	130.330	266.420

Sumber : Kantor BPS Kota Denpasar

Tabel di atas selain menunjukkan adanya populasi berimbang antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Distribusi penduduk yang tergolong berumur produktif (sekitar umur 20-49 tahun) relatif mendominasi yaitu umur 20-29 tahun sebesar 23,87%; umur 30-39 tahun sebesar 19,29% dan umur 40-49 tahun sebesar 13,82%, sehingga penduduk yang berusia produktif tersebut sebesar 56,48%.

2. Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian/Pekerjaan

Karakteristik wilayah yang sedang mengalami proses-proses urbanitas seperti halnya di Kecamatan Denpasar Selatan ditandai dengan semakin terdesaknya sektor tradisional seperti dalam bidang pertanian menuju perkembangan sektor-sektor lain semakin pesat. Data berikut memberi gambaran mengenai sektor-sektor yang sedang berkembang di Kecamatan Denpasar Selatan.

Tabel 2.3
Penduduk Berdasarkan Mata Pencapaian/Pekerjaan

Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	%
Pertanian	1.103	3,03
Perdagangan	7.522	20,67
Bekerja di sektor Industri	3.158	8,67
Jasa dan Pariwisata	13.849	38,04
Sektor Kesehatan	311	0,85
Perbankan/Lembaga Keuangan	1.210	3,32
Angkutan	1.965	5,40
Lain-lain	7.286	20,02
Jumlah	136.090	266.420

Sumber : Kantor BPS Kota Denpasar

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pekerjaan pada sektor jasa dan pariwisata menduduki peringkat pertama (38,04%), menyusul sektor perdagangan pada peringkat kedua (20,67%) dan sektor lainnya pada peringkat ketiga (20,02). Peringkat selanjutnya diduduki masing-masing sektor industri, sektor angkutan, pertanian,

sektor perbankan/lembaga keuangan dan sektor kesehatan. Dari data di atas juga dapat disimpulkan bahwa penduduk Kecamatan Denpasar Selatan yang bekerja sebagai petani hanyalah 3,03%.

3. Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jarak Kecamatan Denpasar Selatan relatif dekat dengan wilayah pusat pendidikan terutama Kota Denpasar. Hal itu secara signifikan memengaruhi kemajuan tingkat pendidikan penduduk setempat. Mengingat jaraknya relatif dekat, maka pendidikan, baik pada strata menengah maupun perguruan tinggi, umumnya ditempuh di kota tersebut. Jarak tempuh dari Kecamatan Denpasar Selatan ke Kota Denpasar yang hanya sekitar 5-10 km biasanya hanya memerlukan waktu perjalanan kurang dari 30 menit dengan menggunakan sepeda motor. Di samping itu, kemajuan tingkat pendidikan penduduk juga dikondisikan oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang cukup memadai di wilayah setempat, terutama sampai pada jenjang pendidikan menengah. Gambaran umum kemajuan tingkat pendidikan tersebut tampak dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	%
Tidak/Belum pernah sekolah	25.192	9,46
Belum tamat SD	61.455	23,25
Tamat SD/ Sederajat	53.933	20,25
Tamat SLTP/Sederajat	42.476	15,94
Tamat SLTA/Sederajat	51.454	19,32
Tamat Diploma	18.665	7,00
Sarjana ke atas	12.746	4,78
Total	266.421	100

Sumber : Kantor BPS Kota Denpasar

Tabel di atas menunjukkan adanya perkembangan pemerataan di bidang pendidikan yang dialami penduduk di Kecamatan Denpasar Selatan. Di samping meratanya kesempatan mengenyam pendidikan, strata pendidikan menengah sampai dengan pendidikan tinggi populasinya cukup besar.

BAB III.

SOSIAL BUDAYA DAN DINAMIKA ALIH FUNGSI LAHAN KECAMATAN DENPASAR SELATAN

A. Sosial Budaya Kecamatan Denpasar Selatan

1. Sistem Kemasyarakatan

Dalam hidupnya manusia cenderung mengadakan hubungan antara sesamanya yang akhirnya membentuk suatu masyarakat. Pola hubungan antara sesama manusia menjadi dasar dari suatu interaksi sosial di antara kelompok serta terciptanya kelompok-kelompok sosial. Selain itu, hubungan juga berkembang dengan lingkungannya sebagai usaha untuk menanggapi secara aktif lingkungan alam tersebut. Beberapa bentuk atau pola hubungan yang berkembang serta pola tanggapan manusia terhadap lingkungannya memunculkan bentuk atau pola-pola kehidupan yang khas disebut sebagai pola-pola kebudayaan manusia (Astika, 1986 : 11).

Masyarakat Hindu di Kecamatan Denpasar Selatan menganut sistem sosial yang mengikat terdiri atas beberapa sistem sosial. Sesuai dengan sistem pemerintahan, bahwa di desa tersebut sekarang terdapat dua jenis desa, yakni desa dinas dan desa adat. Desa dinas adalah merupakan kesatuan wilayah administrasi terkecil dalam suatu susunan wilayah pemerintahan. Kepala desa dinas disebut *perbekel* atau *lurah* berkedudukan sebagai aparat pemerintah di desa yang berfungsi melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Para warga desa terikat oleh kesatuan fungsi yang dijalankan oleh desa sebagai bagian dari struktur vertikal pemerintahan resmi sebagai kesatuan administratif. Kesatuan ini dibatasi oleh adanya wilayah desa yang jelas batas-batasnya, penduduk atau warga desa yang bertempat tinggal di wilayah desa tersebut, dan sistem aturan pemerintahan desa. Warga desa dinas mempunyai fungsi

memelihara dan mengaktifkan kegiatan dalam desa serta tunduk pada sistem aturan yang berlaku.

Desa adat adalah merupakan suatu kesatuan atau persekutuan wilayah berdasarkan atas kesatuan tradisi dari tatakrma pergaulan hidup yang di warisi secara turun-temurun serta diikat oleh suatu *kahyangan tiga*, yaitu Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem (Ardana, 2007 : 10). Dengan kata lain, desa adat merupakan suatu komunitas tradisional dengan fokus fungsi dalam bidang adat dan agama Hindu, serta merupakan satu kesatuan wilayah di mana para anggotanya secara bersama-sama melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan yang ditata oleh suatu sistem budaya (Pitana, 1994: 139). Meskipun pada mulanya desa adat menangani segala urusan sosial kemasyarakatan atau segala urusan yang berhubungan dengan kehidupan bersama masyarakat manusia, namun dewasa ini kegiatannya cenderung hanya terbatas kepada kegiatankegiatan yang menyangkut adat-istiadat atau sosial religius dari masyarakat, karena fungsi-fungsi lainnya telah diambil alih oleh desa dinas. Namun demikian, rasa kesatuan sebagai warga desa adat terikat oleh adanya *karang desa* (pekarangan, wilayah atau tempat bangunan desa) dan *awig-awig desa* (sistem aturan desa yang dibuat dan diberlakukan kepada segenap warga desa).

Pada umumnya tampak beberapa perbedaan antara desa-desa adat di pegunungan dan desa-desa adat di dataran. Desa-desa adat di pegunungan biasanya lebih kecil dan keanggotaannya terbatas pada orang-orang asli yang lahir di desa itu. Sesudah kawin, orang itu langsung menjadi warga desa adat (*karma desa*) dan berhak mengikuti rapat-rapat desa yang diadakan secara teratur pada hari-hari tertentu. Desa-desa adat di tanah datar biasanya lebih besar dan meliputi daerah yang relatif luas, demikian pula keanggotaannya.

Kekuasaan tertinggi pada desa adat terdapat pada rapat anggota atau *sangkep*, sedangkan *bendesa adat* hanya berfungsi sebagai pemegang mandat dari *krama* desa adat dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang berhubungan dengan eksistensi desa adat. Desa adat juga mempunyai harta kekayaan, baik berupa material maupun immaterial. Salah satu kekayaan desa adat adalah pura-pura dengan tanah *pelabanya*, karena keberadaan desa adat terkait langsung dengan kepemilikan *kahyangan tiga*.

Desa adat juga mempunyai otonomi, baik ke luar maupun ke dalam. Otonomi ke luar diartikan sebagai kebebasan untuk mengadakan kontak langsung dengan institusi di luar desa adat, sedangkan otonomi ke dalam berarti kebebasan untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Dalam hubungan ini, Griadhi (1991 : 58-59) menulis sebagai berikut.

"Sesungguhnya otonomi tersebut merupakan otonomi yang bersifat asli, yang muncul dari kelahiran desa adat itu sendiri yang merupakan kekuasaan untuk mengatur kehidupan warganya sehingga segala kepentingan dapat dipertemukan. Otonomi desa adat dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) otonomi dalam bidang keorganisasian, yang merupakan kekuasaan desa adat untuk mengatur kehidupan sebagai suatu organisasi, (2) otonomi dalam bidang sosial ekonomi, yang merupakan kekuasaan untuk mengatur hubungan antar anggota dengan kelompok masyarakat serta mengelola berbagai kekayaan desa adat, dan (3) otonomi di bidang religius, yang menyangkut kepemilikan atas berbagai perlengkapan upacara serta pengaturan terhadap hak dan kewajiban warga desa terhadap berbagai tempat pemujaan yang ada di desa.

Dalam perkembangannya, desa adat senantiasa mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan lingkungannya. Demikian

pula di Kecamatan Denpasar Selatan. Perubahan-perubahan yang terjadi dapat dipandang sebagai suatu *progress* dari masyarakat tradisional menuju masyarakat yang lebih kompleks atau modern. Berbagai perubahan tersebut seiring dengan usaha desa adat di dalam mengadakan berbagai penyesuaian terhadap situasi lingkungan luar, yang meliputi lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, politik, dan teknologi.

Intensitas kontak kebudayaan Bali dengan kebudayaan luar meningkat di Kecamatan Denpasar Selatan, terkait erat dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat di bidang komunikasi dan transportasi, serta keberhasilan Bali menjadi daerah tujuan wisata. Adanya perkembangan kepariwisataan dengan berbagai implikasinya, menyebabkan terjadinya banyak perubahan pada masyarakat Bali, termasuk pula lembaga tradisional desa adat. Desa adat telah mengalami transformasi. Transformasi pada lembaga ini umumnya menuju kepada usaha peningkatan efisiensi kerja dan nilai praktis pelaksanaan berbagai kegiatan (Pitana, 1994 : 159).

Meskipun secara umum dapat dikatakan bahwa desa adat bergerak dalam bidang adat-istiadat dan agama, namun dewasa ini banyak desa adat secara aktif bergerak di bidang ekonomi, sesuai dengan tuntutan masyarakat dan pembangunan. Di beberapa desa adat, termasuk desa adat yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan, telah terjadi pemanfaatan aset desa adat untuk mendatangkan pendapatan ekonomis, termasuk pengontrakan tanah desa kepada masyarakat untuk pembangunan prasarana kepariwisataan. Pendapatan yang diperoleh dari berbagai kegiatan tersebut digunakan untuk membiayai pelestarian dan pengembangan obyek wisata, rehabilitasi tempat suci, pelaksanaan upacara, dan sebagainya.

Dengan dua pengertian seperti itu, jelas dapat dibedakan pengertian desa adat sebagai suatu kesatuan masyarakat dalam satu wilayah desa yang secara bersama-

sama mengaktifkan suatu sistem upacara yang berhubungan dengan kesucian desa. Sedangkan *desa dinas* adalah suatu kesatuan masyarakat dalam wilayah pemerintahan desa yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan administratif bagi kelancaran sistem pemerintahan dan pengaturan warga desa.

Banjar adalah kelompok masyarakat yang lebih kecil dari desa dan menjadi bagian dari desa adat serta merupakan persekutuan hidup sosial. Sebagai bentuk komunitas kecil, *banjar* mempunyai peranan penting dalam membentuk kehidupan masyarakatnya. *Banjar* juga menjadi pusat orientasi para anggota masyarakat untuk suatu kegiatan tertentu serta pilihan untuk pengadaan tenaga dalam upacara. Sebagai bagian dari desa, *banjar* juga mempunyai ciri-ciri yang khas sebagai kesatuan kelompok sosial (Astika, 1986 : 2).

Banjar sebagai organisasi sosial dapat dibedakan menjadi dua, yakni *banjar adat* dan *banjar dinas* atau *banjar patas*. *Banjar adat* mempunyai tugas dan kewajiban khusus dalam kaitannya dengan upacara agama Hindu atau *banjar suka-duka*, sedangkan *banjar dinas* merupakan perpanjangan tangan dari organisasi pemerintahan negara di bawah desa dinas. *Banjar adat* merupakan organisasi di bawah pemerintahan *desa adat* yang kini berdasarkan Peraturan Daerah Bali No. 3 Tahun 2001 disebut dengan nama *desa pakraman*. *Desa pakraman* pada hakikatnya adalah kesatuan masyarakat adat yang anggotanya adalah mereka yang beragama Hindu dan terkait dengan *kahyangan tiga* secara turun temurun.

Sementara itu, azas yang melandasi persekutuan hidup sosial dalam sistem *banjar* adalah azas kebersamaan dan kekeluargaan. Azas kebersamaan dan kekeluargaan itu mendorong munculnya jiwa dan semangat gotong-royong di kalangan warga *banjar* itu sendiri. Dengan demikian maka dapat difahami bahwa fungsi pokok organisasi *banjar* adalah mewujudkan gotong royong dalam persekutuan

hidup bersama di kalangan warga *banjar*, baik dalam keadaan suka maupun duka.

Setiap desa adat telah memiliki *awig-awig* tertulis yang disusun berdasarkan paruman desa adat. Desa adat dipimpin oleh *bendesa* adat dan dibantu *penyarikan* (sekretaris). Desa adat sangat berperan dalam melestarikan tradisi dan budaya, terutama dalam pelaksanaan upacara keagamaan.

Selain *banjar*, di Kecamatan Denpasar Selatan ada juga pengelompokan sosial lain dalam wujud yang lebih kecil, baik dalam lingkup kepentingannya, cakupan wilayah, maupun jumlah anggotanya, yang disebut *seka*. Kadang-kadang *seka* ini merupakan bagian dari organisasi *banjar*, tetapi sering pula *seka-seka* tersebut lepas dari ikatan *banjar*. Pada beberapa kasus bahkan anggota *seka* bisa terdiri atas anggota *banjar*, sehingga merupakan suatu bentuk organisasi sosial yang khas (Astika, 1994 : 111).

Seka adalah lembaga atau kelompok sosial dari beberapa orang anggota *banjar* yang menghimpun diri atas dasar kepentingan yang sama. Setiap *seka* mempunyai jenis kegiatan yang berbeda, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Namun satu hal yang menonjol dari keberadaan *seka* adalah walaupun berbeda dalam kegiatannya, tetapi tetap berorientasi pada kehidupan masyarakat dan tidak terlepas dari *banjar*. Kegiatan *seka*, di samping aktivitas yang menyangkut kepentingan anggotanya, juga banyak membantu kegiatan *banjar*. Seperti halnya *banjar*, *seka* mempunyai anggota, struktur pimpinan, aturan atau *awig-awig* dan fungsi tertentu dalam kaitannya dengan kelompok sosial di lingkungan *banjar*. *Seka-seka* yang populer misalnya *seka manyi* untuk menanam padi, *seka numbeg* untuk mengolah tanah sawah, *seka memula* untuk menanam padi, *seka gong* untuk menabuh gamelan, *seka layangan*, *seka angklung*, *seka teruna* perkumpulan tari baris, *seka arja* perkumpulan tari arja, dan masih banyak lagi *seka-seka* yang lain.

Keberadaan sebuah *seka* dalam struktur organisasi *banjar* atau desa kadang-kadang lebih bersifat struktural, artinya suatu jenis *seka* memang harus ada, seperti misalnya *seka teruna*, *seka gong*, *seka kidung*. Sementara itu, ada juga *seka* di lingkungan *banjar* terus aktif dan berfungsi dalam menunjang kegiatan *banjar* seperti *seka subak*, yang bergerak di bidang irigasi untuk kepentingan pertanian. Hampir seluruh petani terikat dengan *seka* atau organisasi ini. Organisasi *subak* adalah para pemilik atau penggarap sawah yang menerima air irigasi dari bendungan-bendungan yang diurus oleh *subak* (Bagus, 1994 : 291). *Subak* merupakan organisasi petani yang mengelola air irigasi untuk anggota-anggotanya, dan organisasi ini sangat terkenal di seluruh dunia. Sebagai suatu organisasi, *subak* mempunyai pengurus dan aturan-aturan keorganisasian atau *awig-awig*, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Sebagaimana halnya organisasi tradisional, organisasi *subak* menggunakan dasar filosofi *tri hita karana*. Filosofi ini mengajarkan bahwa kebahagiaan manusia akan dapat dicapai jika manusia mampu menjaga keharmonisan hubungan antara tiga faktor dari filosofis tersebut, yaitu *parhyangan* (unsur ketuhanan) *pawongan* (manusia) dan *palemahan* (unsur alam).

Seperti desa-desa lainnya di Bali, di Kecamatan Denpasar Selatan eksistensi *seka* meliputi beberapa aspek kehidupan masyarakat di antaranya menyangkut aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Dalam aspek sosial beberapa *seka* yang eksis adalah *seka-teruna-teruni* (perkumpulan muda-mudi) dari seluruh anggota *banjar*. Fungsinya adalah membantu para anggotanya dalam kegiatan suka-duka, melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemudaan (olahraga, kesenian), dan membantu kegiatan-kegiatan yang ada di *banjar*.

Dalam aspek budaya, *seka* yang ada di Kecamatan Denpasar Selatan adalah *seka gong* (perkumpulan penabuh) dan *seka pesantian* (perkumpulan nyanyian keagamaan). Seni

tabuh gong sudah berkembang sejak lama, sedangkan *seka pesantian* telah ada sejak tahun 1990-an. Selain itu, masing-masing *banjar* adat memiliki perangkat gong lengkap dengan *seka* gongnya, serta beberapa jenis seni pertunjukkan, seperti tari rejang, tari baris, tari topeng, wayang kulit, tari lepas, dan lain-lain.

2. Agama dan Kepercayaan

Seperti diketahui bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Denpasar Selatan memeluk agama Hindu. Agama Hindu, seperti diketahui, berasal dari daratan India. Sebagai negara besar di kawasan Asia Selatan, sejak lama India telah memainkan peranan penting bahkan pengaruhnya, terutama pengaruh budaya sampai ke daratan Asia Tenggara. Kenyataan itu telah memperkuat pendapat betapa luasnya pengaruh kebudayaan India baik dalam bentuk Hinduisme maupun Buddhisme (Yadav, 1998:5).

Data komposisi penduduk berdasarkan agama di Kecamatan Denpasar Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1
Penduduk Berdasarkan Agama

Agama	Jumlah (Orang)	%
Islam	68.924	25,87
Katolik	6.585	2,47
Kristen	10.052	3,77
Hindu	177.825	66,75
Budha	3.034	1,14
Total	266.420	100

Sumber : Kantor BPS Kota Denpasar

Berdasarkan tabel di atas, terlihat penduduk Kecamatan Denpasar Selatan paling banyak memeluk agama Hindu sebanyak 177.825 orang atau 66,75%, menyusul agama Islam sebanyak 68.924 orang atau 25,87%.

Penduduk Kecamatan Denpasar Selatan yang beragama Kristen sebanyak 10.052 orang atau 3,77%, sedangkan yang beragama Katolik sebanyak 6.585 orang atau 2,47%. Kecamatan Denpasar Selatan yang memeluk agama Budha jumlahnya paling sedikit yaitu 3.034 orang atau 1,14%.

Masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan sejak lama telah menganut agama dan kepercayaan dengan berbagai alirannya. Agama adalah kunci sejarah. Kita tidak dapat memahami hasil-hasil budaya masyarakat tanpa mengerti kepercayaan keagamaan yang menjadi latar belakangnya. Dalam semua zaman, hasil utama budaya didasarkan pada gagasan-gagasan keagamaan dan diabadikan untuk tujuan keagamaan (Zoetmulder, 1965: 327).

Pernyataan Dawson yang dikutip oleh Zoetmulder itu berlaku pada situasi dan kondisi Kecamatan Denpasar Selatan, sebab tampak bahwa sejumlah hasil budaya materi dari masa lalu menunjukkan latar belakang dan semangat keagamaan. Perlengkapan beserta sejumlah tinggalan arkeologi di dalamnya jelas menunjukkan fungsinya sebagai benda yang dibuat untuk kepentingan agama, khususnya Agama Hindu. Oleh karena mempunyai latar belakang sejarah yang panjang, pola pikir dan perilaku masyarakat sampai saat ini masih kental mencerminkan budaya Bali yang dijiwai oleh agama Hindu. Budaya Bali mempengaruhi baik karakter maupun orientasi hidup sebagian besar masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan. Budaya Bali dan Agama Hindu saling berinteraksi, berintegrasi, sekaligus merupakan landasan bagi kehidupan masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan.

Agama merupakan hak dasar manusia yang paling hakiki dan sekaligus merupakan ciri yang universal bagi kehidupan sosial manusia. Masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan melaksanakan ajaran agama dilandasi oleh tiga kerangka dasar Agama Hindu, yakni *tatwa* (filsafat), *susila* (etika), dan *upacara* (ritual). Penerapan falsafah *Tri Hita Karana* merupakan pengejawantahan dari

hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia serta makhluk lainnya, dan hubungan manusia dengan alam lingkungannya dimana ia berada. Hal ini merupakan proyeksi dari keyakinan Agama Hindu yang disebut *panca sradha*, yaitu lima dasar keyakinan Agama Hindu yakni percaya adanya *Tuhan, Atman, punarbhawa, karmaphala*, dan *moksa*, ke dalam tata kehidupan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif. Pada akhirnya, tujuan akhir agama Hindu adalah *moksartham jagadhitaya ca iti dharmah* yang berarti tujuan beragama (dharma) ialah untuk mencapai kelepasan, kebebasan atau kesempurnaan roh (*moksa*), kesejahteraan umat manusia, kedamaian, dan kelestarian dunia (*jagadhita*).

B. Dinamika Alih Fungsi Lahan Pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan hingga kini masih terus terjadi. Hal ini dapat dilihat dari data dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Penurunan Luas Tanah Pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan, Tahun 2010 s/d Tahun 2014

Tahun	Sawah (Ha)	% Penurunan	Tegal/Huma (Ha)	% Penurunan	Total (Ha)	% Penurunan
2010	924	-	230	-	1.154	-
2011	924	0 %	230	0 %	1.154	0 %
2012	897	- 2,92 %	183	- 20,43 %	1.080	- 6,41 %
2013	847	- 5,57 %	183	0 %	1.030	- 4,63 %
2014	845	- 0,24 %	183	0 %	1.028	- 0,19 %

Sumber : Kantor BPS Kota Denpasar

Data di atas menunjukkan dalam kurun waktu 2010-2011 tidak terjadi alih fungsi lahan di Kecamatan Denpasar Selatan. Namun dalam kurun waktu tahun 2011-2012 terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, dari 1.154 hektar pada tahun 2011 menjadi 1.080 hektar pada tahun 2012 atau luas lahan pertanian di Kecamatan Denpasar Selatan dalam kurun waktu tersebut mengalami penurunan sebesar - 6,41 %.

Alih fungsi lahan tersebut juga terjadi sepanjang tahun 2012-2013, yaitu dari 1.080 hektar pada tahun 2012 menjadi 1.030 hektar pada tahun 2013 atau mengalami penurunan - 4,63 %. Namun dalam kurun waktu tahun 2013-2014, laju alih fungsi lahan nampaknya mengalami penurunan, yaitu dari 1.030 hektar pada tahun 2013 menjadi 1.028 hektar pada tahun 2014 atau mengalami penurunan - 0,19 %.

Untuk lahan sawah sepanjang tahun 2010-2011 juga tidak terjadi alih fungsi lahan di Kecamatan Denpasar Selatan. Namun dalam kurun waktu tahun 2011-2012 terjadi alih fungsi lahan sawah, dari 924 hektar pada tahun 2011 menjadi 897 hektar pada tahun 2012 atau luas lahan sawah di Kecamatan Denpasar Selatan dalam kurun waktu tersebut mengalami penurunan sebesar - 2,92 %. Alih fungsi lahan sawah tersebut juga terjadi sepanjang tahun 2012-2013, yaitu dari 897 hektar pada tahun 2012 menjadi 847 hektar pada tahun 2013 atau mengalami penurunan - 5,57 %. Namun dalam kurun waktu tahun 2013-2014, laju alih fungsi lahan sawah nampaknya mengalami penurunan, yaitu dari 847 hektar pada tahun 2013 menjadi 845 hektar pada tahun 2014 atau mengalami penurunan - 0,19 %. Sedangkan untuk lahan pertanian yang berupa tegal/huma hanya mengalami alih fungsi lahan pada tahun 2011-2012 yaitu dari 230 hektar pada tahun 2011 menjadi 897 hektar pada tahun 2012 atau mengalami alih fungsi sebesar - 20,43 %.

Terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan non pertanian dibenarkan oleh Ketut Redi, petani penggarap di Dukusari, Sesetan, yang kutipan wawancaranya sebagai berikut:

Mangkin keweh ngerereh carik ring Sesetan, santukan sami sampun dados bangunan umah, wenten dados sekolah, wenten dados karaoke, lan sane tiosan disamping nike mangkin sampun nenten wenten toye, nike mawinan meweh idup tiang dados petani, tiang mangkin usan nanem padi santukan nenten wenten toye, mangkin tiang nandur punyan biyu, tiang ngubuh sampi, mangde wenten tiang anggen nyekolaang pianak, tiang nenten medruwe kebiasaan napi-napi, tiang wantah dados petani kemanten (terjemahan

“Sekarang susah mencari tanah sawah di Sesetan, karena semua sudah jadi bangunan rumah, ada yang jadi sekolah, ada yang jadi karaoke, dan yang lainnya, disamping itu, sekarang sudah tidak ada air irigasi, itu yang menyebabkan hidup saya susah menjadi petani, saya sekarang berhenti menanam padi krn sudah tdk ada air irigasi, sekarang saya menanam pohon pisang, saya memelihara sapi, supaya ada yang dipakai menyekolahkan anak, saya tidak mempunyai keahlian apa-apa, saya hanya jadi petani saja) (hasil wawancara dengan Ketut Redi, petani penggarap di Dukusari, Sesetan, pada tanggal 2 Agustus 2015).

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa saat ini di Kelurahan Sesetan sulit ditemukan tanah sawah. Hampir semua tanah sawah sudah beralih fungsi menjadi bangunan rumah, sekolah, karaoke, dan sebagainya. Ditambah dengan tidak adanya pengairan irigasi, maka hidup Ketut Redi mengalami kesulitan, mengingat yang bersangkutan tidak memiliki keahlian selain menjadi petani. Oleh karena itu, Ketut Redi sulit untuk berganti profesi/pekerjaan untuk bertahan hidup dan menyekolahkan anaknya, Ketut Redi mengandalkan hasil dari menanam pisang dan memelihara sapi.

Hal yang hampir senada juga dikemukakan oleh I Nyoman Arsana, petani penggarap lainnya yang berdomisil di jalan raya Sesetan sebagaimana diutarakan sebagai berikut :

..... disebabkan oleh banyaknya alih fungsi lahan persawahan menjadi bangunan beton, apakah itu jadi rumah, jadi toko, jadi sekolah dan lain sebagainya. alih fungsi lahan pertanian di daerah Sesetan terjadi sudah cukup lama sekitar tahun 80 an, waktu itu saya *menjadi* penggarap lahan sawah, lama kelamaan beriringnya waktu seperti sekarang ini, sawah sudah tidak ada, irigasi juga sudah tidak ada, sehingga saya berhenti jadi petani. Ketika berhenti jadi petani saya mengalami masa-masa sulit perekonomian, saya mencoba berdagang dengan jualan rujak, gagal..ganti profesi buka bengkel motor, gagal juga ... saya hanya tahunya jadi petani, tidak bisa mengerjakan apa-apa selain menjadi petani. Sehingga saya sekarang tidk memiliki

pekerjaan tetap, saya hanya bisa minta sama anak-anak (I Nyoman Arsana, Wawancara 3 Agustus 2015).

Dari wawancara di atas, diketahui bahwa alih fungsi lahan persawahan menjadi rumah, toko, sekolah, dan sebagainya mulai terjadi di Kelurahan Sesetan sejak tahun 80-an. Mengingat sawah di jalan raya Sesetan sudah tidak ada lagi, I Nyoman Arsana mencoba beralih profesi dengan berdagang, jualan rujak, buka bengkel motor, tapi selalu mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan yang bersangkutan tidak memiliki keahlian lain selain bertani juga.

Alih fungsi lahan persawahan yang terjadi di Kelurahan Sesetan, juga terjadi di Desa Pemogan. Hal ini terungkap dari wawancara dengan I Wayan Mardia, Pekaseh Subak Kapaon dan petani yang bertempat tinggal di jalan Kapaon Pemogan, yang petikan wawancaranya sebagai berikut:

Tanah sawah banyak yang beralih fungsi menjadi bangunan, dan bangunan itu yakin tidak ada ijinnya, semestinya pemerintah bagian tata kota yang lebih sering turun untuk mengecek IMB agar alih fungsi bisa diperlambat atau ditertibkan (I Wayan Mardia, Wawancara 5 Agustus 2015).

Kemudian ditambahkan pendapatnya mengenai penyebab terjadinya alih fungsi lahan sebagai berikut:

Menurut *tiang* (saya) alih fungsi lahan disebabkan karena jadi petani sudah tidak menjanjikan lagi seperti apa yang sudah *tiang* jelaskan tadi, disamping itu lebih cepat mendapatkan uang. Contoh: kalau jadi petani hanya mendapat hasil 100 ribu per are per 110 hari, kalau tanah dikontrakkan 1 are 3 jt per tahun itu sudah kontrakkan tanah paling murah, itu kalau tanah dikontrakkan. Kalau tanahnya dijual di daerah ini harga tanah sekarang 650 juta per are tinggal mengalikan saja. Uangnya taruh di bank didepositokan tinggal menikmati hasil. Di samping tanah dikontrakkan atau dijual, juga ada alih fungsi diakibatkan bertambahnya jumlah penduduk, contoh; dulu dalam satu keluarga punya anak 3 atau 4 kemudian semua sudah nikah dan punya anak,

sehingga dalam rumah tersebut menjadi sesak, sehingga orang tua mereka atau kakeknya menyuruh anak-anaknya membuat rumah di lahan yang mereka miliki agar bisa lebih mandiri. Inilah yang menjadi penyebab, kenapa alih fungsi lahan begitu marak, di samping gaya hidup di jaman sekarang yang serba ada (I Wayan Mardia, Wawancara 5 Agustus 2015).

Dari wawancara di atas, dapat diketahui bahwa di Desa Pemogan juga banyak tanah sawah yang beralih fungsi menjadi bangunan. I Wayan Mardia menuding bahwa bangunan-bangunan tersebut tidak ada ijinnya, sehingga yang bersangkutan menyarankan agar Bagian Tata Kota turun ke lapangan untuk memeriksa IMB. Penyebab alih fungsi lahan, masih menurut I Wayan Mardia, karena bertani sudah tidak menguntungkan lagi. Dengan perhitungan sederhana dikemukakan bahwa dari 1 are tanah petani hanya mendapat Rp. 100 ribu per 110 hari. Jadi, dalam 1 tahun dihasilkan hanya Rp. 330 ribu per are tanah. Sedangkan kalau dikontrakkan 1 are tanah paling sedikit mendapat Rp. 3 juta per tahun. Apalagi kalau dijual per are bisa berharga Rp. 650 juta. Hasil penjualan tanah dapat didepositokan dan petani tinggal menikmati bunga depositonya. Namun menurut I Wayan Mardia, penyebab alih fungsi lahan bukan hanya itu saja. Dari sisi kebutuhan petani akan bangunan rumah juga menjadi penyebab lain alih fungsi lahan. Misalnya pertambahan jumlah keluarga akan diikuti pertambahan kebutuhan rumah, sehingga untuk memenuhinya, mereka terpaksa mendirikan rumah di atas sawah yang mereka miliki.

Berdasarkan hasil wawancara-wawancara yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan non pertanian tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal atau desakan kepentingan bisnis saja, namun faktor internal dari petani sendiri seperti misalnya kebutuhan membangun rumah di atas lahan sawah untuk keluarga yang semakin bertambah juga menjadi penyebab terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan non pertanian.

BAB IV. PROSES ALIH FUNGSI LAHAN PERSAWAHAN DI KECAMATAN DENPASAR SELATAN

Bab ini membahas proses alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan untuk menjawab permasalahan pertama dalam kajian ini. Proses alih fungsi lahan persawahan yang dibahas dalam bab ini adalah proses alih fungsi lahan melalui hegemoni, negosiasi dan oposisi. Salah satu kendala produksi pangan adalah terjadinya alih fungsi lahan persawahan menjadi non-pertanian. Berkembangnya kegiatan perekonomian menuntut adanya peningkatan penggunaan tanah untuk dapat memwadhahi segala aktivitas mereka, sehingga tekanan alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan non-pertanian mendorong terjadinya alih fungsi tersebut. Alih fungsi lahan persawahan untuk kepentingan non-pertanian seperti industri permukiman perkantoran, pusat-pusat pembelanjaan, hotel, restaurant, dan fasilitas penunjang pariwisata lainnya mengakibatkan termarginalkannya sektor pertanian sekaligus marginalisasi terhadap petaninya sendiri.

Akibatnya kontribusi sektor pertanian terhadap ketahanan pangan dari tahun ke tahun semakin kecil. Hal ini disebabkan karena semakin sempitnya tanah persawahan sebagai akibat alih fungsi lahan pertanian, pemindahan hak, dan *image* pertanian sebagai kegiatan yang penuh lumpur (kotor). Sektor pertanian menjadi kurang menarik dibanding sektor industri lainnya, di samping kurang memperoleh perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah. Sektor pertanian semakin termarginalkan padahal sektor ini sangat tangguh bertahan dalam menghadapi gejolak ekonomi dunia. Konsekuensi logisnya adalah sektor pertanian yang merupakan salah ciri Indonesia sebagai negara agraris semakin terdegradasi, termasuk para petani yang belum siap untuk bersaing di dunia modern dan industri yang sangat kompetitif. Di sisi lain sektor-sektor lainnya seperti misalnya

sektor industri manufaktur dan sektor pariwisata dengan leluasa mengeksploitasi sektor pertanian untuk kepentingannya sendiri.

Marginalisasi sektor pertanian berikut petaninya yang diakibatkan oleh alih fungsi lahan persawahan tersebut mengakibatkan para petani sebagai subyek yang termarginalkan telah “dipaksa” melepaskan tanah persawahan mereka karena alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan non-pertanian difasilitasi oleh kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Lahan persawahan yang terpaksa dilepaskan oleh para petani tersebut diubah menjadi perumahan, perkantoran, perguruan tinggi, pusat pembelanjaan dan sebagainya.

Observasi yang dilakukan oleh penulis di Desa Pemogan, Kelurahan Pedungan dan Kelurahan Sesetan yang menjadi obyek kajian dan berdasarkan keterangan oleh petani setempat, sebenarnya petani sendiri mengalami dilema ketika harus menjual tanah pertaniannya. Mereka pada umumnya tergoda oleh pola hidup modern seperti misalnya kepemilikan kendaraan bermotor, *handphone*, atau barang-barang lain yang mencerminkan simbol modernitas. Akibat godaan itu, sebagian besar petani menjual lahan persawahan sehingga mulai terjadi alih fungsi lahan persawahan.

Pembahasan mengenai proses alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan menggunakan teori dari John Storey. Dalam studinya mengenai proses penerimaan budaya pop dapat terjadi melalui hegemoni, negosiasi dan oposisi. Storey (2003: 61) mencotohkan pada proses penerimaan budaya pop melalui televisi, program yang disiarkan oleh televisi itu akan berusaha menghegemoni pemirsanya agar program televisi tersebut tidak ditinggalkan pemirsanya. Selanjutnya Storey (2003; 62) menyatakan untuk menghegemoni audiens tersebut prosesnya tidak mudah, mesti melalui negosiasi dan bahkan kadang-kadang melalui oposisi. Storey mengakui bahwa dalam teorinya ini, Storey banyak dipengaruhi oleh Teori Hegemoni dan Gramsci.

Hampir senada dengan Storey, Stuart Hall dari perspektif ilmu komunikasi, membahas penerimaan televisi dengan istilah Teori *Audiens Reception* (Penerimaan Audiens). Teori Stuart Hall

tersebut, tentang *encoding* dan *decoding* dalam penerimaan audiens, mendorong terjadinya interpretasi-interpretasi beragam dari teks-teks media selama proses produksi dan resepsi (penerimaan). Dengan kata lain, makna tidak pernah pasti. Hall menurunkan 3 interpretasi yang digunakan individu untuk menafsirkan atau memberi respons terhadap persepsinya mengenai kondisi dalam masyarakat, yaitu *dominan/hegemonic code* adalah disini posisi audiens yang menyetujui dan menerima langsung apa saja yang disajikan oleh televisi, menerima penuh ideology yang dari program tayangan tanpa ada penolakan atau ketidaksetujuan terhadapnya. *Negotiated code*, penonton yang mencampurkan interpretasinya dengan pengalaman-pengalaman sosial tertentu mereka. Penonton yang masuk kategori negosiasi ini bertindak antara adaptif dan oposisi terhadap interpretasi pesan atau ideology dalam televisi. *Oppositional code* adalah ketika penonton melawan atau berlawanan dengan representasi yang ditawarkan dalam tayangan dengan cara yang berbeda dengan pembacaan yang telah ditawarkan. Tipe ini tidak merasakan kesenangan pada saat menonton televisi. Ia menolak sajian atau ideology dominan dari televisi (Hall, 1997: 138).

Dalam penjelasan, Stuart Hall menyatakan khalayak melakukan *decoding* terhadap pesan media melalui tiga kemungkinan posisi, yaitu:

Posisi Hegemoni Dominan, yaitu situasi dimana khalayak menerima pesan yang disampaikan oleh media. Ini adalah situasi dimana media menyampaikan pesannya dengan menggunakan kode budaya dominan dalam masyarakat. Dengan kata lain, baik media dan khalayak sama-sama menggunakan budaya dominant yang berlaku. Media harus memastikan bahwa pesan yang diproduksi harus sesuai dengan budaya dominan yang ada dalam masyarakat. Jika misalnya khalayak menginterpretasikan pesan iklan di media melalui cara-cara yang dikehendaki media maka media, pesan, dan khalayak sama-sama menggunakan ideologi dominan

Posisi Negosiasi, yaitu posisi dimana khalayak secara umum menerima ideologi dominant namun menolak penerapannya dalam kasus-kasus tertentu (sebagaimana

dikemukakan Stuart Hall: *the audience assimilates the leading ideology in general but opposes its application in specific case*) Dalam hal ini, khalayak bersedia menerima ideologi dominant yang bersifat umum, namun mereka akan melakukan beberapa pengecualian dalam penerapannya yang disesuaikan dengan aturan budaya setempat.

Posisi Oposisi, Cara terakhir yang dilakukan khalayak dalam melakukan decoding terhadap pesan media adalah melalui oposisi yang terjadi ketika khalayak audiensi yang kritis mengganti atau mengubah pesan atau kode yang disampaikan media dengan pesan atau kode alternatif. Audiensi menolak makna pesan yang dimaksudkan atau disukai media dan menggantikannya dengan cara berpikir mereka sendiri terhadap topik yang disampaikan media. Stuart Hall menerima fakta bahwa media membingkai pesan (Hall, 1997: 138-140)

Dalam konteks proses alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan, proses alih fungsi lahan persawahan tersebut diterima masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan melalui hegemoni, negosiasi dan oposisi sebagaimana dikemukakan oleh John Storey ataupun Stuart Hall tersebut di atas. Proses alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan dapat diuraikan sebagai berikut.

A. Alih Fungsi Lahan Persawahan melalui Hegemoni

Alih fungsi lahan persawahan pada era globalisasi ini menjadikan masyarakat petani termarginalkan. Masyarakat petani yang termaginalisasikan ini merupakan kelompok di dalam masyarakat yang menjadi subjek hegemoni kelas-kelas yang berkuasa. Pengalihfungsian lahan sawah menjadi fungsi non-pertanian merupakan bentuk hegemoni yang dilakukan pemerintah berkolaborasi dengan pengusaha secara halus, canggih, dan intelek melalui wacana pembangunan. Wacana diberikan secara halus sehingga petani tidak menyadari bahwa dirinya telah terhegemoni. Bahkan, dalam praktiknya wacana hegemoni dilengkapi dengan dominasi yang sifatnya represif.

Hegemoni dalam proses alih fungsi lahan tidak terjadi begitu saja, tetapi melalui beberapa tahap. Seperti misalnya pada kasus alih fungsi lahan persawahan yang terjadi di Subak Kerdung, Kecamatan Denpasar Selatan yang sudah mulai terjadi pada pertengahan tahun 1990-an. Tahun 1996, Subak Kerdung memiliki luas areal 313 ha tetapi pada tahun 2010 tinggal 235 ha dengan jumlah krama subak (anggota) 250 orang. Dalam selang waktu 14 tahun terjadi penyusutan lahan subak seluas 78 ha (33,19 persen). Beberapa pura yang terkait dengan keberadaan Subak Kerdung antara lain Pura Balun yang dianggap sebagai Pura Pangulun Subak (hulunya subak) dan Pura Bedugul. Pura Balun dimiliki oleh 30 KK petani dengan bukti kepemilikan yang sah (semacam bengkok) seluas 1,5 ha. Keterikatan anggota subak terhadap pura ini bersifat sukarela, namun demikian secara kolektif, Pekaseh (Ketua Subak) biasanya menyampaikan *punia* (sumbangan berupa uang) secara berkala pada setiap upacara yang digelar di Pura Balun (setiap 6 bulan atau 210 hari).

Pada tahap awal alih fungsi lahan Subak Kerdung para pemilik modal menghegemoni masyarakat di sekitar Subak Kerdung dengan cara memberi solusi atas kebutuhan masyarakat. Kebutuhan masyarakat di sini tidak hanya menyangkut kebutuhan sehari-hari saja seperti sandang dan pangan saja, tapi bagi masyarakat Bali ada kebutuhan lainnya yaitu kebutuhan untuk membiayai kegiatan adat.

Kegiatan adat yang di dalamnya juga terdapat kegiatan keagamaan yaitu Hindu mendasari kehidupan bermasyarakat di Kota Denpasar. Upacara-upacara keagamaan yang ada dalam kegiatan adat ini selalu melibatkan orang lain baik itu yang termasuk garis keturunan keluarganya atau masyarakat lain. Kegiatan adat tidak dapat terlepas dari ketersediaan dana pendukungnya. Kegiatan adat untuk melakukan upacara keagamaan memerlukan sarana dan prasarana upacara sebagaimana kepercayaan Hindu. Selain itu setiap kegiatan adat tidak pernah lepas dari keterlibatan orang banyak (masyarakat sosial). Sebagai bentuk terimakasih atas kesediaan

masyarakat lain terlibat dalam kegiatan adat maka, maka dalam penyelenggara upacara tersebut harus menyediakan jamuan makanan. Jamuan makanan sering menjadi ukuran *gengsi* bagi masyarakat perkotaan dan sekitarnya. Inilah alasan kegiatan adat di Bali khususnya di Kecamatan Denpasar Selatan harus didukung oleh ketersediaan dana yang tidak sedikit. Alasan mencari dana yang diperuntukkan sebagai pendukung kegiatan adat ini sering menjadi pendorong masyarakat Hindu untuk menjual aset yang mereka miliki, termasuk juga lahan persawahannya.

Selain kebutuhan untuk mendukung kegiatan adapt tersebut, ada kebutuhan lain yang juga mulai merasuki kebutuhan masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan diantaranya kebutuhan untuk memiliki *handphone*, sepeda motor atau kebutuhan-kebutuhan bagi masyarakat modern lainnya yang pada waktu itu harganya tidak murah. Tak dapat dipungkiri bahwa pada pertengahan hingga akhir tahun 1990-an, masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan sudah terkena imbas modernisasi dalam kehidupan mereka. Masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan mulai tergoda untuk memiliki barang-barang mewah yang sebenarnya merupakan kebutuhan sekunder, namun dianggap seperti kebutuhan primer bagi masyarakat yang mulai memasuki modernisasi. Sebagaimana halnya masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan.

Untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, pada umumnya masyarakat di Kecamatan Denpasar Selatan kurang mempunyai sumber penghasilan, kecuali dari lahan sawahnya. Di sisi lain, para pemilik modal mengiming-imingi harga yang besar bila pemilik sawah bersedia menjual sawahnya untuk digunakan sebagai fungsi lain. Tidak sedikit masyarakat yang tergiur atas tawaran itu sehingga melepaskan sawahnya. Dalam hal ini masyarakat menganggap para pemilik modal seakan “dewa penolong” yang menolong mereka pada saat mereka membutuhkan dana, meskipun harus merelakan sawahnya. Padahal tanpa disadari para pemilik modal sudah mulai menghegemoni masyarakat dengan modal yang dimilikinya.

Tahap pertama dari proses menghegemoni ini oleh Gramsci disebut sebagai tahap "korporat-ekonomis". Seorang korporatis mungkin adalah apa yang di pahami sebagai individu yang mengutamakan kepentingannya sendiri. Seseorang berafiliasi dengan tahap korporat-ekonomis sebagai fungsi dari kepentingan pribadinya, menyadari bahwa mereka membutuhkan dukungan orang lain untuk memperoleh keamanan mereka sendiri. Dalam istilah ini, juga dapat dimasukkan kerjasama jangka-pendek antara kapitalis-kapitalis (yang dalam hal ini para pemilik modal) yang sesungguhnya saling berkompetisi satu sama lainnya. Hal yang ditekankan adalah: pada tahap perkembangan historik ini, kelompok yang bersangkutan belum memiliki rasa solidaritas di antara anggota-anggotanya.

Dalam tahap kedua, anggota-anggota kelompok mulai menyadari bahwa terdapat wilayah kepentingan yang lebih luas dan bahwa terdapat orang lain yang berbagi kepentingan dengan mereka dan akan terus membagi kepentingan-kepentingan ini dalam masa depan yang terjangkau. Dalam tahap inilah rasa solidaritas berkembang, tapi solidaritas ini masihlah hanya berbasiskan kepentingan ekonomi bersama. Tidak terdapat pandangan dunia bersama atau apa pun semacam itu. Solidaritas seperti ini dapat mengarah pada upaya-upaya untuk menggalakkan reformasi-reformasi di bidang hukum untuk memperbaiki posisi kelompok tersebut dalam sistem yang ada, tapi belum ada kesadaran tentang bagaimana mereka, dan yang lainnya, dapat diuntungkan oleh pembentukan sistem yang baru.

Pada kasus alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan seperti halnya kasus alih fungsi persawahan Subak Kerdung anggota-anggota kelompok yang dalam hal ini para petani yang terhegemoni. Secara alamiah manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat menjalani hidupnya tanpa bantuan manusia lain. Oleh sebab itu dalam memutuskan dan menjalankan ketuputusan tersebut seseorang selalu mempertimbangkan lingkungan sosialnya. Itulah

sebabnya segala perilaku seseorang dipengaruhi oleh kejadian atau peristiwa yang terjadi di lingkungan sosialnya.

Kondisi ini terbukti nyata dalam proses alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan terdapat alasan bahwa dalam melakukan kegiatan penjualan lahan pada makelar tanah terdapat alasan bahwa di sekitar lahan miliknya banyak terjadi kegiatan *pengkaolingan* lahan sawah. Pada umumnya para petani yang menjual sawahnya memberikan alasan serupa. Siapa yang memulai kegiatan tersebut juga sulit diketahui. Namun yang jelas maraknya usaha *pengkaolingan* yang terjadi di Subak Kerdung berpengaruh secara emosional bagi pemilik lahan di subak tersebut. Maraknya kegiatan *pengkaolingan* ditambah harga jual lahan di sekitar subak yang semakin lama semakin meningkat menjadi alasan yang paling mendasar dalam perubahan perilaku pemilik lahan di Subak Kerdung untuk mengalihfungsikan lahan persawahannya.

Selanjutnya dikatakan oleh Gramsci hanya dengan melewati tahap ketiga maka hegemoni dapat benar-benar menjadi mungkin. Dalam tahap ini, anggota-anggota kelompok sosial yang dalam hal ini para petani yang terhegemoni mulai menyadari kepentingan dan kebutuhan untuk menjangkau melampaui apa yang dapat mereka lakukan dalam konteks kelas-kelas mereka tersendiri. Para petani membutuhkan agar kepentingan mereka turut diusung oleh kelompok-kelompok lainnya yang ter subordinasi seperti halnya mereka. Hal ini terjadi karena lemahnya kelembagaan subak dalam pencegahan kegiatan alihfungsi lahan sehingga para petani dapat menjual sawahnya semau-mau mereka sendiri.

Suatu lembaga atau organisasi dapat berjalan dengan baik apabila organisasi tersebut memiliki aturan-aturan serta sangsi-sangsi yang jelas. Subak sebagai pelaku kegiatan pertanian khususnya kegiatan pertanian lahan basah (persawahan) dan pelaku kegiatan pengalihfungsian lahan persawahan seharusnya memiliki aturan-aturan dan sangsi-sangsi kuat dalam mengatasi terjadinya kegiatan alihfungsi

lahan persawahan. Subak seharusnya menjadi pilar utama dalam pencegahan alihfungsi lahan.

Namun kondisi ini tidak mampu dilakukan oleh subak khususnya Subak Kerdung. Aturan-aturan pelarangan kegiatan alih fungsi lahan sawah dan sangsi-sangsi terkait pelanggaran aturan pelarangan kegiatan alih fungsi lahan sawah tidak mampu diwujudkan dalam *awig-awig* ataupun dalam bentuk *perarem* subak. *Awig-awig* dan *perarem* hanya mengatur teknis melakukan kegiatan pertanian di Subak tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa *awig-awig* dan *perarem* subak itu hanya mengatur mengenai teknis kegiatan pertanian di Subak Kerdung. Tidak adanya aturan dan sangsi tertulis yang disepakati bersama anggota subak dalam usaha mencegah terjadinya alih fungsi lahan di Subak Kerdung, menjadi alasan kuat bagi para pemilik modal untuk menghegemoni para petani agar mau menjual sawahnya dan hal ini yang benar-benar terjadi dengan maraknya penjualan lahan sawah pada area Subak Kerdung.

Aturan-aturan dan sangsi-sangsi yang lemah dari Subak Kerdung juga mengakibatkan tidak tertatanya sistem jual beli lahan di daerah subak. Dan ini juga yang mengakibatkan lahan-lahan sawah di Subak Kerdung banyak dikuasai oleh orang-orang di luar wilayah subak bahkan luar kota. Kondisi ini terlihat jelas karena Pekaseh Subak Kerdung tidak memiliki data kepemilikan lahan persawahan di sepanjang wilayah subaknya. Hal ini sama dengan pendapat Prakarsa (2010: 36) berpendapat bahwa pelaku pembelian tanah biasanya bukan penduduk setempat, sehingga mengakibatkan terbentuknya lahan-lahan guntai yang secara umum rentan terhadap proses alih fungsi lahan persawahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan hegemoni pada proses alih fungsi lahan persawahan di Subak Kerdung pada khususnya dan Kecamatan Denpasar Selatan pada umumnya dilakukan melalui wacana tentang pembangunan perumahan, yang diberitahukan oleh pengusaha (investor) dengan dukungan pemerintah daerah setempat

kepada masyarakat petani, terutama di Desa Pemogan, Kelurahan Pedungan dan Kelurahan Sesetan. Pemberhentian akan adanya pembangunan ini disertai dengan janji-janji tertentu, yang cukup menggiurkan masyarakat petani, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat. Janji-janji hegemonik itu memperlihatkan adanya kontestasi antara penguasa dan masyarakat terhadap lahan yang beralih fungsi, dengan kepentingan yang berbeda. Petani lebih memaknai lahan tersebut sebagai faktor produksi bagi kehidupannya di samping memberikan makna religius terhadap areal persawahan.

Sementara itu kebijakan pemerintah yang telah memfasilitasi alih fungsi lahan persawahan menjadi lahan non-pertanian dipandang masih ambivalen. Terlebih lagi dalam sebutan masyarakat petani, kebijakan tampak masih samar dan “jauh tinggi” dari jangkauan pemikiran dan pengetahuan mereka. Kelompok masyarakat petani menerimanya sebagai regulasi mutlak pemerintah yang disebut dengan “aturan dari atas”. Alih fungsi lahan pertanian yang terus berjalan cepat pada pembangunan fasilitas pendukung kehidupan modern oleh pemerintah, swasta hingga perubahan tata-ruang, diterima sebagai sebuah pilihan atau langkah ekonomis dan kenyataan hidup modern di era globalisasi.

Pada awalnya petani merasa untung karena dengan masuknya investor yang melakukan pembangunan perumahan dan sarana prasarana kegiatan bisnis di daerahnya, yang berarti ada peredaran uang dalam wilayahnya. Akan tetapi, petani telah terjebak oleh ideologi kapitalis yang diusung oleh pengusaha. Hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Gramsci (dalam Barker, 2009:62) bahwa hegemoni adalah situasi di mana suatu blok historis, faksi kelas berkuasa menjalankan otoritas sosial kepemimpinan atas kelas-kelas subordinat melalui kombinasi antara kekuatan dan persetujuan. Sesuai dengan pandangan Gramsci, dapat

dikatakan bahwa negara sebagai penguasa adalah blok historis atau kelas berkuasa yang menjalankan otoritasnya kepada kaum petani, sebagai kelas subordinat dengan kombinasi kekuatan (*power*). Di samping itu kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dengan alasan telah disetujui lewat sebuah konsensus, yang di belakangnya terselip kesepakatan yang sangat merugikan kaum petani. Hegemoni ini terlihat lewat kebijakan pemerintah yang mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi lahan non-petani, dengan alasan demi terwujudnya pembangunan masyarakat, yang dapat diperlihatkan dalam gambar berikut:



Gambar 4.1 Alih Fungsi Lahan Persawahan menjadi Non Pertanian

Tanpa disadari oleh petani, hegemoni para pemilik modal dalam proses alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan, maka mau tidak mau petani akan tergusur minggir sekaligus lahan persawahan pun berubah menjadi permukiman, atau seperti apa yang diinginkan kaum pemodal. Hegemoni yang dilakukan oleh penguasa (pemerintah) dengan memanfaatkan isu pembangunan yang selalu dieluh-elukan pemerintah Kota Denpasar yaitu meningkatnya kebutuhan hunian dan cepatnya akses menuju tempat-tempat penting. Hal ini yang membuat kaum pemodal atau kaum kapitalis memanfaatkan keadaan, seperti yang tampak berikut ini.

Para pemilik modal atau para pengembang datang ke masyarakat dan menawarkan harga yang bagus dengan janji-janji akan mempekerjakan masyarakat di sini untuk bekerja pada proyek-proyek pemodal tersebut. Kalau ada warga yang tidak mau biasanya akan di datangi oleh oknum pemerintah untuk merayu masyarakat tersebut (Hasil wawancara dengan I Made Budi, pada tanggal 15 Desember 2015)

Hal senada juga dengan apa yang disampaikan oleh I Komang Wiguna sebagai berikut:

Para pemodal dengan berbagai upaya berusaha untuk merayu para petani pemilik lahan sawah untuk mau menjual sawahnya yang akan dipakai sebagai tempat usaha dan nanti anggota keluarga yang mau menjual lahannya akan ditampung sebagai tenaga kerja di proyek milik pemodal tersebut (Hasil wawancara dengan I Komang Wiguna, pada tanggal 16 Desember 2015).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat umumnya diiming imingi dengan janji-janji manis sehingga mau melepaskan tanah mereka secara baik-baik dalam kesadaran yang palsu. Hal semacam demikian menurut Gramsci adalah hegemoni melibatkan pendidikan dan kemenangan konsensus daripada pemaksaan kekuatan brutal dan koersif semata (Barker, 2009:373). Sesungguhnya petani

tergusur dari ranah ekosistemnya akibat dari konstruksi pemerintah saat itu lewat hegemoni pemerintah. Ketidaktahuan petani tentang konstruksi kepentingan kaum kapitalis tersebut secara tidak langsung terjadi semenjak revolusi hijau. Selama ini kaum tani digerogeti dengan bagaimana memproduksi hasil pertanian secara cepat, instan, dan dalam keuntungan yang fantastis. Di sisi lain pemerintah memiliki kepentingan atas swasembada pangan, padahal sesungguhnya semua itu merupakan konstruksi kaum kapitalis yang terencana lewat teknologi-teknologi kimia, khususnya di bidang pertanian dan sebagai awal penghacuran kaum petani.

Lewat kuasa dan pengetahuan pemerintah, hegemoni dijalankan pada masyarakat petani dengan memberikan arahan bahwa pestisida sebagai komponen terpenting dalam usaha tani dan sangat berguna dalam membantu petani merawat pertaniannya. Pestisida dapat mencegah lahan pertanian dari serangan hama. Hal ini berarti jika para petani menggunakan pestisida, hasil pertaniannya akan meningkat dan akan membuat hidup para petani menjadi semakin sejahtera. Hegemoni pemahaman kepada masyarakat tersebut menyebabkan akhirnya pestisida digunakan di hampir setiap lahan pertanian. Di balik wacana manfaat besar pestisida, ternyata pestisida memiliki dampak yang merugikan dalam pemakaiannya. Setelah adanya penelitian-penelitian terbaru, diketahui ternyata pestisida dapat merusak ekosistem air yang berada di sekitar lahan pertanian. Di samping itu sesungguhnya dampak negative pestisida diketahui oleh kaum kapitalis lebih dahulu. Dikatakan demikian hal ini telah dikonstruksi jauh hari oleh kaum barat, yang sesungguhnya sudah mengetahui akan menimpa masyarakat petani. Kondisi ini dapat diketahui dari hasil wawancara berikut ini:

Sejak sawah-sawah di wilayah saya menggunakan bibit dan pupuk yang diberikan pemerintah pada awalnya hasil panen melimpah, namun ketika mencoba untuk tidak lagi menggunakan pupuk atau pestisida kebanyakan hasil pertanian menjadi buruk, sehingga saat terpaksa harus terus menggunakan pupuk dan

pestisida agar panen di sawah tetap bagus (Hasil wawancara dengan I Wayan Fiba, pada tanggal 18 Desember 2015).

Hal tersebut juga disampaikan Ni Nengah Muliani sebagai berikut:

Tadinya kami senang, dengan bantuan pupuk dan pestisida dari pemerintah walaupun diberikan tidak terus menerus, hasil panen sawah kami meningkat. Tapi lama-lama kok kami jadi sangat tergantung dengan pupuk dan pestisida tersebut. Soalnya kalau kami tidak menggunakan pupuk dan pestisida, hasil panen akan menurun tajam. Padahal bantuan pemerintah sudah tidak ada lagi. Jadi, ya, kami harus terpaksa membeli pupuk dan pestisida yang harganya tidak murah (Hasil wawancara dengan Ni Nengah Muliani, pada tanggal 20 Desember 2015).

Mengenai pemberian pupuk oleh pemerintah tersebut dibenarkan oleh I Wayan Suastika yang kutipan wawancaranya sebagai berikut:

Subsidi pupuk urea 200 kg, pupuk NPK 200 kg per hektar, sebenarnya ada juga subsidi pupuk organik 300 kg, tp petani tdk mau ambil pupuk organik dg alasan bahwa bila mempergunakan pupuk organik akan lebih cepat dan banyak rumput yang tumbuh dibandingkan dg padi. Pupuk ini hnya subsidi saja, contoh harga pupuk Rp.2000 per kg, petani hanya bayar Rp.1800 per kg, yang Rp 200 disubsidi oleh pemerintah, dan sisi warna juga ada perbedaan dg pupuk yang tdk disubsidi, kalau yg disubsidi warnanya ping, sedangkan yg non subsidi warnanya putih (Hasil wawancara dengan I Wayan Suastika, pada tanggal 5 Agustus 2015).

Hasil wawancara di atas mendukung pendapat yang dikemukakan Gramscsi, maka masyarakat petani telah dikonstruksi oleh kaum kapitalis (investor) lewat hegemoni pemerintah yang membuat petani, bergantung pada pupuk produksi mereka. Jika pupuk dan pestisida digunakan, akan menghasilkan sisa-sisa air yang mengandung pestisida. Air

yang mengandung pestisida ini akan mengalir melalui sungai atau aliran irigasi dan dapat menyuburkan tanaman ganggang dan enceng gondok, di perairan tempat sungai atau irigasi tadi bermuara. Ketika air sawah tidak lagi berkualitas maka dengan sendirinya sawah itu akan membunuh dirinya sendiri.

Dari gambaran di atas, dapat dikatakan bahwa di balik janji-janji pemerintah yang berkolaborasi dengan pengusaha, ada relasi-relasi berkepentingan di dalamnya terutama petani akan semakin tergantung kepada perusahaan multinasional yang menyediakan bibit, pupuk, dan pestisida. Ini berarti bahwa kebebasan para petani untuk melakukan aktivitas pertaniannya tidak lagi bisa mandiri karena telah terpasung oleh hegemoni pemerintah dan pengusaha yang lebih mengutamakan kepentingan dirinya sendiri, tanpa peduli akan kepentingan masyarakat petani.

Selain merusak ekosistem, pestisida juga dapat mengganggu kesehatan terutama kesehatan petani. Dengan seringnya menggunakan pestisida, maka kontak kulit dengan pestisida juga akan semakin sering dan dapat mengakibatkan iritasi kulit. Jika pestisida terhirup dan masuk paru-paru, dapat mengganggu kesehatan pernapasan.

Dengan adanya dampak buruk pestisida pada lahan pertanian secara otomatis masyarakat dikonstruksi untuk terus-menerus membeli obat-obatan untuk pertanian. Masyarakat dicekoki dengan cara-cara pertanian teknologi modern. Petani dianjurkan menggunakan bibit unggul, produksi rekayasa genetik, dan pupuk kimia yang dikatakan berkualitas bagus, yang pada awalnya semua diberikan secara gratis oleh pemerintah, tetapi pada akhirnya masyarakat harus membelinya.

Kenyataan saat ini, yang menyebabkan petani mengalami kekurangan modal adalah akibat dari ketergantungan terhadap produsen bibit dan pupuk yang diproduksi oleh kaum kapitalis. Jika petani tidak menggunakan pupuk pada tanamannya, maka hasil sawah tidak akan baik sehingga memengaruhi hasil panen. Oleh karena itu, kadang-

kadang ongkos produksi dan hasil panen tidak berimbang yang mengakitnya banyaknya lahan yang tidur. Petani selalu mengalami gagal panen kalau tanaman tidak diberikan pesisida, pupuk, dan sebagainya.

Program revolusi hijau juga telah mengubah bentuk sosial masyarakat petani di pedesaan. Semula masyarakat petani di pedesaan hidup dengan sistem komunal, saling bantu dan gotong royong kemudian berubah memasuki sistem kapitalis yang lebih mengedepankan modal dan berorientasi produksi. Para petani pedesaan yang pada umumnya menganut teguh moral ekonomi sebagai prinsip hidup dan memegang erat tradisi komunal kemudian berubah pendiriannya menjadi berpihak kepada ekonomi rasional. Sejak rezim Soeharto memanfaatkan perubahan ini untuk mendukung hegemoni kekuasaannya dengan mengundang investor untuk membangun sektor industri dengan menjual buruh berupah murah. Para buruh ini datang dari kalangan petani di pedesaan karena kehilangan pekerjaan atau kehilangan tempat usaha atau tanah sebagai akibat dari program revolusi hijau. Pada konteks inilah, sebenarnya peran tersembunyi yang dimainkan revolusi hijau untuk mendukung sektor industri. Dengan demikian, program revolusi hijau ini digunakan sebagai katup pengaman kekuasaan Soeharto dari potensi protes, perlawanan atau revolusi dari masyarakat petani yang telah kehilangan pekerjaan, kehilangan lapangan usaha, berpendapatan dan berupah rendah yang disebabkan karena perubahan kebijakan pada sektor pertanian, dari pertanian tradisional ke pertanian modern (Fahmid, 2004 :7).

Hasil wawancara berikut ini membuktikan bahwa para petani kehilangan sawahnya karena iming-iming dari kaum pemodal yang didukung oleh pemerintah.

Saya menjual sawah saya karena tanah di wilayah saya akan dibangun industri atau tempat usaha/bisnis lainnya. Kami dijanjikan bahwa saya atau anak saya atau keluarga kami akan dipekerjakan di hotel yang akan di dirikan. Iya, sih, pada mulanya memang terjadi seperti itu. Semua penduduk di sini yang mau menjual

sawahnya, dipekerjakan dengan hubungan kontrak kerja 6 bulan, ada yang 1 tahun. Tetapi setelah kontrak habis, kontrak tersebut tidak diteruskan, diputus begitu saja. Alasannya karena kami tidak memiliki keahlian dan keterampilan yang mendukung pekerjaan, sehingga dikatakan kinerja kami dibilang jelek atau tidak memuaskan (Hasil wawancara dengan I Made Narayana, pada tanggal 21 Desember 2015).



Gambar 4.2 Alih Fungsi Lahan Persawahan di Sesetan Menjadi Tempat-tempat Usaha/Bisnis

Kebijakan-kebijakan pembangunan pertanian yang lain untuk petani seperti program simpan pinjam dengan dana bergulir, Kredit Usaha Tani (KIJI), justru membuat petani-petani asli semakin tidak berdaya. Akses permodalan dan akses informasi, umumnya hanya dinikmati oleh para petani-

petani kaya sementara petani miskin tidak mampu untuk mengaksesnya. Selain itu, kebijakan-kebijakan pertanian semacam itu tidak mengajari para petani mengenai strategi yang tepat untuk mengelola dan mengembangkan pertanian, namun justru hanya mengajari petani menjadi seorang manajer (pengelola pembangunan) seperti bagaimana mengelola kegiatan simpan pinjam yang baik, bagaimana mengembangkan dana bergulir dan sebagainya. Padahal, aspek penting yang sebenarnya dibutuhkan oleh petani adalah kemampuan untuk mengelola pertanian beserta produk yang dihasilkan.

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Pemogan, Kelurahan Pedungan dan Kelurahan Sesetan menunjukkan kondisi demikian. Dari berbagai kebijakan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah ternyata kurang memberikan pengaruh bagi peningkatan ketrampilan petani dalam mengelola lahan pertaniannya. Para petani masih mengelola pertanian mereka secara tradisional, akibatnya tingkat pendapatan dan kesejahteraan mereka pun tidak pernah naik. Mayoritas petani hanya trampil ketika menanam padi atau tanaman-tanaman palawija saja (kacang, jagung) tetapi mereka tidak memiliki ketrampilan yang cukup baik ketika menanam tanaman pangan yang bernilai ekonomi lebih tinggi seperti lombok, tanaman sayuran dan buah-buahan.

Beberapa petani di ketiga lokasi tersebut yang mencoba untuk melakukan jenis-jenis tanaman yang bernilai ekonomi tinggi tersebut banyak yang mengalami kegagalan. Menurut hasil kajian lapangan di ketiga lokasi tersebut, pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh kelompok tani ataupun PPL (Petugas Penyuluh Lapangan Pertanian) jarang membahas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kompetensi dan ketrampilan petani. Frekuensi pertemuan dari kelompok tani yang ada jarang sekali. Dengan demikian, sepertinya petani sudah pasrah dengan keadaan yang mereka terima sekarang ini. Mereka mengelola tanaman pertanian hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan subsisten saja. Tidak ada upaya berarti

yang dilakukan kelompok tani untuk memberdayakan anggotanya. Kelompok tani biasanya hanya menjadi perantara dari pemerintah kepada petani ketika ada program-program bantuan untuk petani seperti Kredit Usaha Tani, bantuan pupuk murah dan sebagainya. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil kajian lapangan di dua tempat tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan pertanian yang dilakukan oleh pemerintah cenderung memarginalisasikan kehidupan petani.

Setelah rejim Orde Baru runtuh, nasib petani juga tidak membaik. Sejak tahun 1997, sektor manufaktur dan modern telah menjadi mesin pokok pertumbuhan ekonomi Indonesia, sementara sektor pertanian mendapat prioritas kedua dalam debat tentang kebijakan dan jatah sumber anggarannya terus menurun (Booth dalam Breman & Wiradi, 2004 :10). Kehadiran IMF di Indonesia pasca krisis ekonomi justru semakin memperburuk kondisi petani Indonesia. Lewat *structural adjustment programme* dan *agreement on agriculture/AoA*, IMF, Bank Dunia dan WTO mendesak tarif bea masuk pasar domestik dipangkas sampai habis, menciptakan pasar domestik yang sangat ramah impor dan menyulap Indonesia menjadi negara berkembang paling liberal di dunia. Dengan demikian, IMF membuat kewenangan pemerintah menjadi mandul karena berbagai kebijakan ekonomi nasional terutama kebijakan di sektor pertanian berada di bawah dikte-dikte IMF. Akibat liberalisasi perdagangan tersebut, menyebabkan impor pun melonjak tinggi dan ekspor komoditas pertanian merosot. Sejak tahun 1994, Indonesia jatuh dari negara *net food exporter country* menjadi *net food importer country*. Dari hari ke hari, angka ketergantungan impor atas berbagai komoditas pangan terus menanjak. AoA telah menghancurkan pasar pertanian di Indonesia dan menggeser produksi pangan dari dalam negeri menjadi lebih pada import (Khudori, 2005 : 16).

Produk-produk pertanian dari negara maju tersebut terus meraih Pasar produk Pertanian di negara berkembang karena mereka dapat menjualnya dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan produk pertanian dari negara-

negara berkembang termasuk Indonesia. Dibukanya lebar-lebar pasar domestik tentu saja memaksa petani yang gurem, miskin dan tradisional untuk bertarung dengan petani negara-negara maju yang kaya dan ditopang beragam proteksi serta subsidi besar-besaran dari negaranya.

Liberalisasi perdagangan di bidang pertanian tersebut, cocok dengan berbagai kebijakan pemerintah selama ini yang justru lebih cenderung suka memanen pangan di pasar daripada memanen pangan di lahan sendiri. Dengan kata lain, kebijakan ketahanan pangan pemerintah lebih bertumpu pada pasar, bukan lahan domestik. Kondisi demikian, mengakibatkan semakin tidak efisiennya sistem produksi pangan dalam negeri yang pada saatnya nanti akan menyebabkan tidak berfungsinya sarana dan prasarana produksi selama-beberapa masa siklus produksi. Hal ini akan diiringi dengan kemandekan produksi dalam negeri. Dalam jangka panjang, kebijakan pemerintah ini akan menyingkirkan produk-produk pangan dan budaya pangan asli Indonesia. Potensi produksi pangan asli selanjutnya menjadi kurang atau malah tidak terurus, keragaman sumber daya bahan, kelembagaan, dan budaya pangan lokal terabaikan, dan lebih tragisnya beberapa diantaranya bahkan terkuras keluar (Khudori, 2004: 206).

Sejak orde Baru runtuh, kebijakan pemerintah di bidang pertanian juga belum memberikan keberpihakan kepada petani. Pasca Orde-Baru, Pemerintah melakukan kebijakan penghapusan subsidi pupuk dan pestisida kepada petani. Kebijakan ini menyebabkan harga-harga sarana produksi pertanian menjadi mahal sehingga membuat para petani miskin kesulitan untuk membelinya. Petani memang selalu menjadi korban kebijakan pemerintah, karena meskipun jumlah mereka besar akan tetapi mereka tidak pandai menyuarakan kepentingan mereka.

Berbagai upaya peningkatan kesejahteraan petani tambah dipersulit dengan semakin menyempitnya lahan garapan tiap petani di Indonesia. Selain faktor tradisi warisan,

kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah juga berperan dalam penyempitan lahan persawahan, seperti modernisasi dan kapitalisasi pertanian yang berakibat peralihan fungsi lahan pertanian menjadi perumahan, rumah-rumah pertokoan, kawasan industri maupun mal-mal. Revolusi hijau telah menyebabkan terjadinya peningkatan ketimpangan kepemilikan lahan yang mengarah kepada konsentrasi kepemilikan lahan.

Hegemoni penguasa/pemerintah terhadap masalah alih fungsi lahan pertanian yang dapat mengurangi jumlah lahan pertanian, terutama lahan sawah, telah berlangsung sejak dasawarsa 90-an. Akan tetapi sampai saat ini pengendalian alih fungsi lahan pertanian belum berhasil diwujudkan. Selama ini berbagai kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah pengendalian konversi lahan sawah sudah banyak dibuat. Setidaknya ada 10 peraturan/perundangan yang berkenaan dengan masalah ini, seperti dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Peraturan/Perundangan Terkait dengan Alih-Guna Lahan Pertanian

No	Peraturan/Perundangan	Garis besar isi, khususnya yang terkait dengan alih guna lahan pertanian
1.	UU No.24/1992	Penyusunan RTRW Harus Mempertimbangkan Budaya Pangan/SIT:
2.	Kepres No.53/1989	Pembangunan kawasan industri, tidak boleh konversi SIT/Tanah pertanian Subur
3.	Kepres No.33/1990	Pelarangan Pemberian Izin Perubahan Fungsi Lahan Basah dan Pengairan Beririgasi Bagi Pembangunan Kawasan Industri:

4.	SE MNA/KBPN 410-1851/1994	<i>Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Non Pertanian Melalui Penyusunan RTR</i>
5.	SE MNA/KBPN 410-2261/1994	Izin Lokasi Tidak Boleh Mengkonversi Sawah Irigasi Teknis (SIT)
6.	SE/KBAPPENAS 5334/MK/9/1994	Pelarangan Konversi Lahan Sawah Irigasi Teknis Untuk Non Pertanian
7	SE MNA/KBPN 5335/MK/1994	Penyusunan RTRW Dati II Melarang Konversi Lahan Sawah Irigasi Teknis untuk Non Pertanian
8.	SE MNA/KBPN 5417/MK/10/1994	Efisiensi Pemanfaatan Lahan Bagi Pembangunan Perumahan
9.	SE MENDAGRI 474/4263/SJ/1994	Mempertahankan Sawah Irigasi Teknis untuk mendukung Swasembada Pangan.
10.	SE MNA/KBPN 460- 1594/1996	a. Mencegah Konversi Tanah Sawah dan Irigasi Teknis Menjadi Tanah Kering:

Namun demikian, implementasi peraturan-peraturan tersebut tidak efektif karena tidak didukung oleh data dan sikap proaktif yang memadai. Tiga kendala mendasar yang menjadi alasan peraturan pengendalian konversi lahan sulit dilaksanakan yaitu: (1) Kebijakan yang kontradiktif; (2) Cakupan kebijakan yang terbatas; (3) Kendala konsistensi perencanaan (Ripley, 1985: 62).

Penyebab pertama, kebijakan yang kontradiktif terjadi karena di satu pihak pemerintah berupaya melarang terjadinya alih fungsi, tetapi di sisi lain kebijakan pertumbuhan industri/manufaktur dan sektor non pertanian lainnya justru mendorong terjadinya alih fungsi lahan-lahan pertanian. Yang kedua, cakupan kebijakan yang terbatas. Peraturan-peraturan tersebut di atas baru dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan/badan hukum yang akan menggunakan tanah dan/atau akan merubah tanah pertanian ke non pertanian. Perubahan penggunaan tanah sawah ke non pertanian yang dilakukan secara individual/peorangan belum tersentuh oleh peraturan-peraturan tersebut. Padahal perubahan fungsi lahan yang dilakukan secara individual secara langsung diperkirakan cukup luas. Kendala konsistensi perencanaan disebabkan karena Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilanjutkan dengan mekanisme pemberian ijin lokasi adalah instrumen utama dalam pengendalian untuk mencegah terjadinya konversi lahan sawah beririgasi teknis. Dalam kenyataannya banyak RTRW yang justru merencanakan untuk mengkonversi tanah sawah beririgasi teknis menjadi non pertanian.

Kelemahan lain dalam peraturan perundangan yang ada yaitu: (1) Objek lahan pertanian yang dilindungi dari proses konversi ditetapkan berdasarkan kondisi fisik lahan, padahal kondisi fisik lahan relatif mudah direkayasa, sehingga konversi lahan dapat berlangsung tanpa melanggar peraturan yang berlaku; (2) Peraturan yang ada cenderung bersifat himbuan dan tidak dilengkapi sanksi yang jelas, baik besarnya sanksi maupun penentuan pihak yang dikenai sanksi; (3) Jika terjadi konversi lahan pertanian yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku sulit ditelusuri lembaga yang paling bertanggung jawab untuk menindak karena ijin konversi adalah keputusan kolektif berbagai instansi. (Simatupang dan Irawan, 2012:53).

Selain itu dua faktor strategis lain adalah *pertama*, yang sifatnya fundamental adalah petani sebagai pemilik lahan dan pemain dalam kelembagaan lokal belum banyak dilibatkan

secara aktif dalam berbagai upaya pengendalian alih fungsi. *Kedua*, belum terbangunnya komitmen, perbaikan sistem koordinasi, serta pengembangan kompetensi lembaga-lembaga formal dalam menangani alih fungsi lahan pertanian. Beberapa kelemahan dan keterbatasan tersebut di atas telah menyebabkan instrument kebijakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian yang selama ini telah disusun tidak dapat menyentuh secara langsung simpul-simpul kritis yang terjadi di lapangan.

Menyempitnya lahan persawahan akibat alih fungsi tanah yang berarti juga menyempitnya luas lahan garapan petani mendorong mereka untuk memperoleh penghasilan dengan bekerja di luar usaha tani. Dengan demikian, petani memiliki dua peran yakni sebagai produsen pangan (sebab mereka berusaha tani) tetapi juga sebagai konsumen (sebab harus membeli pangan di pasar berhubung hasil produksi usaha taninya sangat kecil dan tidak mencukupi kebutuhan pangan keluarga petani).

Di bidang agraria misalnya, kebijakan yang erat kaitannya dengan pangan telah direformasi menuju kebijakan neoliberal. Banyak produk perundang-undangan yang diciptakan demi untuk mendukung atau menciptakan iklim persaingan bebas. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air; Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, semuanya merupakan undang-undang yang menjamin untuk

melindungi kepentingan perusahaan agribisnis yang menanamkan modal mereka dalam bidang pangan di negeri Indonesia ini. Hal ini juga merupakan salah satu penyebab terjadinya marginalisasi petani.

Sementara itu, permodalan merupakan sarana penting dalam melakukan segala hal di dunia ini terlebih di dunia modern saat ini. Hal itu berbeda jauh dengan dunia lama (dunia tradisi). Keadaan saat ini di mana setiap pergerakan individu tidak terlepas dari modal, baik berupa modal materi maupun modal yang sifatnya abstrak. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Depdiknas, 2008:964) dinyatakan bahwa permodalan adalah seluk-beluk mengenai modal, sementara modal harta benda (uang, barang) yang dapat digunakan untuk menghasilkan sesuatu, yang menambah kekayaan, atau barang yang digunakan sebagai dasar bekal untuk bekerja.

Bentuk marginalisasi melalui bidang permodalan adalah bentuk dipinggirkannya petani atau dengan kata lain memproses petani dari keadaan semula untuk dijadikan seperti keinginan pemodal dengan tujuan tertentu. Termarginalkannya petani sebagai akibat terjadinya alih fungsi lahan persawahan, tentunya dikonstruksi oleh pemodal lewat modal yang dimilikinya. Hal ini diungkapkan oleh I Gede Tantrayuda sebagai berikut:

Petani di sini menjual sawahnya karena tidak bisa membayar utang yang sebagaimana dulu dipakai untuk membeli pupuk dan pestisida di samping untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun panennya gagal. Ada juga yang punya utang yang tadinya untuk modal membuka usaha. Tapi karena tidak memiliki keterampilan berusaha, ya, usahanya bangkrut, tapi terlanjur punya utang. Ada juga yang menjual sawah untuk menyekolahkan anak-anaknya bahkan sampai perguruan tinggi (Hasil wawancara dengan I Gede Tantrayuda, pada tanggal 23 Desember 2015).

Hal yang hampir senada diungkapkan oleh I Wayan Suyuga yang mengatakan sebagai berikut:

Alasan untuk menjual sawah bermacam-macam, tapi pada umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu bisa berarti untuk pemenuhan makan, pakaian, dan lain-lain. Ada juga untuk menyekolahkan anak, untuk membeli sepeda motor. Sepeda motor sekarang sudah menjadi kebutuhan, kan, di Kota Denpasar ini (Hasil wawancara dengan I Wayan Suyuga, pada tanggal 25 Desember 2015).

Hasil wawancara di atas mengindikasikan bahwa persoalan tersebut menurut Scott (1981: 4-5) adalah bahwa moral ekonomi petani didasarkan atas norma subsistensi dan norma resiprositas. Ketika petani mengalami suatu keadaan yang dapat merugikan kelangsungan hidupnya, maka mereka akan menjual dan menggadaikan harta benda mereka. Scott mengungkapkan bahwa petani menggunakan hasil sawah untuk kebutuhan hidup, selebihnya dijual untuk membeli beberapa barang kebutuhan, seperti garam, kain, dan untuk memenuhi tagihan tagihan dari pihak luar (Scott, 1981:4-5). Banyak persoalan dalam mencari modal yang membuat petani terpaksa menjual tanah. Masalah permodalan dan pembiayaan usaha di bidang pertanian tersebut mempunyai cerita yang sejalan dengan upaya pemerintah setempat, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Berbagai program terobosan telah dilakukan oleh pemerintah, tetapi sampai saat ini belum terlihat niat baik itu.

Program-program pemberdayaan masyarakat petani Desa Pemogan, Kelurahan Pedungan dan Kelurahan Ssetan dilakukan dengan berbagai bentuk dan strateginya. Semua program tersebut dimaksudkan untuk memberikan penguatan permodalan kepada masyarakat miskin, seperti kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses modal/kredit perbankan. Dalam praktiknya kelompok petani tersebut dalam konteks pemberian modal masih belum mendapatkan akses. Kelompok petani yang masuk dalam usaha kecil hanya memperoleh akses kurang dari 25%, kucuran pemberian modal

diberikan dalam sistem perkreditan nasional, yang diikuti oleh sistem perkreditan daerah. Proporsi akses terhadap perkreditan nasional tersebut akan semakin kecil, yaitu tidak lebih dari 10% jika dilihat dari segi bidang usaha pertanian.

Akses petani terhadap sumber-sumber modal yang resmi masih sangat terbatas, tetapi lebih mudah mendapatkan modal dari peminjam uang dengan bunga tinggi (rentenir). Jika lahan usaha tani dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit (modal) dari perbankan, maka hampir dapat dipastikan bahwa sebagian besar petani tidak akan mendapatkan modal, yang bersumber dari lembaga keuangan resmi. Oleh karena itu, modal menjadi bagian dari penghambat usaha tani, sekaligus menjadi sebab termarginalnya kaum petani.

Masalah dan tantangan lainnya dalam pemberian modal petani oleh perbankan adalah tingkat pengembalian kredit yang umumnya rendah dan berpotensi besar pada kredit bermasalah. Penghasilan dari usaha tani jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan kebutuhan rumah tangga. Hal ini berdampak kepada alokasi pembayaran cicilan kredit. Hal ini dikemukakan oleh I Wayan Mardia, Pekaseh Subak Kepaon dan Petani di Pemogan sebagai berikut:

Sangat sulit, Sekarang ini sangat susah jadi petani mengolah sawah karena pendapatan sangat minim sekali, kalau saya contohkan satu are hanya dapat 100 ribu dalam kurun waktu 110 hari. Pendapatan per are hanya 300 ribu, Kenapa petani dapat 100 ribu, karena pembagiannya 100 ribu untuk pemilik tanah, 100 ribu untuk ongkos-ongkos seperti sewa traktor, ongkos tanam, ongkos panen. Beda pada zaman dulu petani dalam mengolah sawah mempergunakan sapi, tanam padi dengan gotong royong, waktu pengerjaannya atau prosesnya yang lama, Kalau pake sapi pengerjaan lahan bisa sampai 20 hari, sedangkan pakai traktor hanya hitungan hari. Tapi sekarang serba cepat dan gampang, mengolah sawah sudah pake traktor dengan cara sewa, tanam padi dengan cara ngongkosin.. sehingga itu yang membuat petani penghasilannya kecil, kalau ingin penghasilan tinggi, jangan tanggung-tanggung jadi petani, minimal menggarap tanah

sawah 1 hektar, baru akan mendapatkan hasil yang lumayan, kalau jadi petani hanya menggarap 25 are, tidak akan bisa hidup, apa yang dipakai menyekolahkan anak, apalagi sekarang ini harga serba mahal. Kalau menggarap sawah 1 hektar dapat penghasilan 30 juta.. 10 juta untuk pemilik, 10 juta untuk ongkos² atau pinjam sana sini, dan 10 juta untuk petani dalam waktu 3 bulan dapat penghasilan segitu, kan lumayan sehingga bisa mencukupi hidup. Kalau dihitung-hitung petani itu digaji 100 ribu per hari itulah kira² kehidupan petani. Penghasilan petani tdk mencukupi bila hanya 25 are sehingga banyak petani hanya dipakai sambilan (Hasil wawancara dengan I Wayan Mardia, pada tanggal 5 Agustus 2015).

Hal senada juga disampaikan oleh I Putu Santika sebagai berikut:

Petani yang memiliki lahan sawah hanya 25 are, hasil panennya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena hasilnya hanya cukup untuk menutupi biaya produksi saja. Biaya produksi ini tidak sesuai dengan hasil panen sawah yang hanya 25 are tersebut. Kalau mau untung petani paling tidak harus memiliki sawah minimum 1 hektar (Hasil wawancara dengan I Putu Santika, pada tanggal 26 Desember 2015)

Hal itu dibenarkan oleh I Komang Winduarsa yang kutipan wawancaranya sebagai berikut:

Kalau cuma punya sampai 20-30 are saja tidak akan untung. Untuk biaya produksi saja seringkali kurang. Kalau mau untung, paling sedikit ya 1 hektar lah (Hasil wawancara dengan I Komang Winduarsa, pada tanggal 27 Desember 2015).

Petani kekurangan modal, bahkan akses permodalan sangat terbatas. Petani tidak mandiri dan banyak yang tidak bertani lagi. Hal ini disebabkan oleh norma subsistensi. Sebaliknya resiprositas akan timbul apabila ada sebagian dari anggota masyarakat menghendaki adanya bantuan dari anggota masyarakat yang lain. Hal ini akan menyebabkan

berbagai etika dan perilaku para petani. Scott menambahkan bahwa para petani adalah manusia yang terikat, dalam aktivitas ekonominya. Mereka (petani) dalam aktivitasnya sangat tergantung pada norma-norma yang ada, mendahulukan selamat dan tidak mau mengambil risiko. Aktivitas mereka hanya semata mata mencukupi kebutuhan konsumsi. Petani subsisten inilah yang dinamakan ekonomi moral petani (Scott, 1981:5). Faktor lain yang mempersulit mendapatkan modal adalah persyaratan dan bunga yang tinggi yang dibebankan pada para petani peminjam modal usaha. Pemerintah belum cukup tegas dan belum bisa menyikapi hal-hal yang dibutuhkan para petani. Perhatian pemerintah terhadap petani sangat kurang membuat para petani sulit memperoleh modal dalam konteks pengadaan pupuk secara tidak langsung menimbulkan alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan.

Solusi tabungan dan pinjaman berbunga rendah yang diberlakukan pada petani akan dapat berkontribusi positif untuk kemandirian petani dalam menjawab masalah modal usaha tani, tetapi kenyataannya tak pernah terjadi. Namun, ada hal positif yang dilakukan oleh *krama* subak, yang memberikan pinjaman modal kepada petani.

Istilah gotong royong mengacu pada kegiatan saling menolong atau saling membantu dalam masyarakat. Tradisi kerja sama tersebut tercermin dalam berbagai bidang kegiatan masyarakat, di antaranya adalah kegiatan dalam membangun rumah, memperbaiki sarana umum, mengadakan hajatan, dalam bencana alam, dan kematian (Sajogya, 2005 : 28).

Maraknya utang, dan pengkreditan mendorong bank untuk menyediakan sarana pengkreditan/utang. Namun, hal itu juga sangat sulit untuk dijangkau oleh para petani. Bunga yang diperhitungkan sangat besar ditambah lagi dengan agunan yang begitu berat. Hal tersebut membuat petani sangat kewalahan dan tidak sanggup menjangkaunya. Di samping itu, pemerintah juga mengusulkan berbagai macam lembaga, baik mikro maupun makro. Namun, hal tersebut juga sangat

merepotkan para petani. Ilmu dan keterampilan yang dimiliki tidak memadai untuk mengakses hal tersebut yang letaknya jauh dari areanya, belum lagi hal tersebut dipengaruhi oleh bunga dan jaminan yang harus diberikan kepada pemberi dana talangan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses alih fungsi lahan persawahan di Desa Pemogan, Kelurahan Pedungan dan Kelurahan Sesetan merupakan bentuk hegemoni pengusaha (permodalan) yang didukung penguasa (pemerintah). Sebenarnya petanipun tidak hanya menerima begitu saja, namun perlawanan yang dilakukan hanya berbentuk pasrah dan diam. Menurut Scott (2003: 287-387) pasrah dan diam merupakan bentuk perlawanan terselubung terhadap hegemoni pengusaha dan penguasa tersebut. Pasrah dan diam bukan berarti tidak *ngedumel* di belakang. Hal ini mendukung teori Subaltern dan Teori Hegemoni.

Teori Subaltern yang menyatakan masyarakat petani yang termarginalkan ini merupakan kelompok di dalam masyarakat yang menjadi subjek hegemoni kelas-kelas yang berkuasa. Perhatian utama Teori Subaltern adalah penekanan pada *difference*, termarginalkan, terpinggirkan, posisi tepi, subordinat, menomorduakan, dekonstruksi, representasi, dan identitas. Perhatian pemikiran Teori Subaltern terfokus pada kelompok yang terpinggirkan dan terbungkam, yang tidak memiliki daya dan kemampuan di dalam menunjukkan eksistensinya (Gayatri Spivak, 1996: 81).

Sementara itu dalam Teori Hegemoni disebutkan bahwa kelompok berkuasa mendapatkan persetujuan kelompok subordinat atas subordinasinya. Kelompok berkuasa yakin dalam hal ini Pemda Denpasar beserta jajarannya dan golongan masyarakat kaya tidak ditentang oleh kelompok yang dikuasai, yakni petani di Kecamatan Denpasar Selatan, karena ideologi, kultur, nilai-nilai, norma-norma, dan politiknya sudah diinternalisasikan sebagai kepunyaan sendiri oleh kelompok subordinat. Begitu konsensus didapat, maka ideologi, kultur,

nilai norma, dan politik akan terlihat semakin wajar dan terlegitimasi (Gramsci dalam Sugiono, 1999 : 17).

Dalam konteks alih fungsi lahan persawahan, gaya hidup masyarakat membutuhkan biaya sehingga rela menjual sawahnya. Bagi masyarakat yang berada pada kelas kaya, kebutuhan itu akan menghegemoni masyarakat kelas miskin untuk melepaskan sawahnya dengan tawaran uang yang tidak sedikit.

B. Alih Fungsi Lahan Persawahan melalui Negosiasi

Negosiasi merupakan kosakata yang sudah sering didengar. Negosiasi merupakan proses yang sering dilakukan dalam hidup dan sering pula tidak disadari kalau tengah melakukan negosiasi. Negosiasi menurut Jaqueline M. Nolan-Haley (1992: 19) (adalah: *"Negotiation may be generally defined as a consensual bargaining process in which parties attempt to reach agreement on a disputed or potentially disputed matter."*) Terjemahan bebasnya adalah: "Negosiasi dapat diartikan secara umum sebagai konsensual dari proses penawaran antara para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan tentang suatu sengketa atau sesuatu hal yang berpotensi menjadi sengketa. Negosiasi menurut H. Priyatna Abdurrasyid (2010: 23) adalah: "Suatu cara di mana individu berkomunikasi satu sama lain mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari-harinya" atau "Proses yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika ada pihak lain yang menguasai apa yang kita inginkan.

Sebenarnya alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan terjadi bukan karena petani tidak menyadari terjadinya alih fungsi lahan tersebut, namun justru pada umunya petani menyadari bahwa dengan menjual lahan sawahnya mereka akan kehilangan sawah yang selama ini menjadi penghidupannya. Untuk itu, petani melakukan negosiasi baik negosiasi dengan pengusaha maupun negosiasi dengan Pemerintah Daerah. Negosiasi dengan pengusaha dimaksudkan untuk meminta ganti rugi setinggi-tingginya, sedangkan negosiasi dengan Pemerintah Daerah dimaksudkan

untuk menunda atau membatalkan rencana alih fungsi lahan atau meminta pengganti lahan di daerah lain yang tentunya dengan permintaan lebih luas.

Dalam pelaksanaan negosiasi sesungguhnya tidak ada standardisasi proses atau tahapan baku yang menjadi tolak ukur baik tidaknya negosiasi. Tahapan-tahapan negosiasi dapat berkembang dengan sendirinya tergantung pada permasalahan yang dihadapi. Meskipun demikian, secara umum proses bernegosiasi memiliki pola sama, yaitu sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini, negosiator mulai mengadakan *kick off meeting* internal untuk keperluan pengumpulan informasi relevan yang lengkap, pembentukan tim apabila diperlukan. Dalam rangka pembentukan tim, perlu diadakan "pembagian peran", peran yang ada biasanya adalah:

- a. Pemimpin tim negosiator dengan tugas memimpin tim, memilih dan menentukan anggota tim, menentukan kebijakan khusus, dan mengendalikan anggota tim lainnya.
- b. Anggota Kooperatif yang menunjukkan simpati kepada pihak lain dan juga bertindak hati-hati agar pihak lain merasa kepentingannya tetap terlindungi. Peran ini seolah-olah mendukung penawaran pihak lain.
- c. Anggota Oposisi yang bertugas untuk membantah argumentasi yang dilakukan pihak lain, anggota ini juga berusaha untuk membuka kelemahan dan merendahkan posisi tawar pihak lain.
- d. *Sweeper* yang bertugas sebagai problem *solver* pemecah kebuntuan dalam negosiasi, dan bertugas menunjukkan inkonsistensi pihak lain.

Selain pembentukan tim, pada tahap ini perlu dibahas mengenai strategi yang akan di lakukan, apakah rigid atau fleksibel atau keduanya. Strategi juga dapat ditentukan berdasarkan kemampuan tim yang ada.

Pada proses peralihan lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan, tahap persiapan ini ditandai dengan munculnya kantor developer-developer atau pengembang-pengembang di Kecamatan Denpasar Selatan. Dalam kantor developer tersebut sudah ada pembagian tugas atau pembagian peran siapa-siapa yang menjadi pemimpin negosiator untuk mendekati pemerintah ataupun masyarakat agar tujuan mereka untuk mengalihfungsikan lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan. Dalam tim ini juga ada pegawai/petugas yang berperan untuk melakukan debat, bujuk rayu ataupun intimidasi kepada masyarakat yang tidak mau menjual sawahnya. Kelompok yang memiliki peran ini yang disebut sebagai *sweeper* atau pemecah masalah jika terjadi kebuntuan dalam proses alih fungsi lahan persawahan tersebut.

2. Tahap Proposal

Pada tahap ini, negosiator dapat memilih, apakah langsung melakukan penawaran pertama atau menunggu pihak lain yang mengajukan penawaran. Dalam tahap ini, negosiator sudah harus siap mempelajari kemungkinan-kemungkinan yang ada. Meneliti serta membaca strategi pihak lain adalah tepat jika dilakukan pada tahap ini.

Pada proses alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan, tahap proposal ini dilakukan pada awal-awal terjadinya alih fungsi lahan seperti halnya alih fungsi lahan Subak Kerdung, Kecamatan Denpasar Selatan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Pada awal terjadinya alih fungsi lahan yaitu pada pertengahan tahun 1990-an, harga sawah di Kecamatan Denpasar Selatan masih di bawah Rp. 100 juta per are. Harga ini masih merupakan harga "proposal" bagi para pengembang. Pada awal 2000-an sampai tahun 2010, para pengembang mulai bersaing untuk mendirikan perumahan dan ruko-ruko di Kecamatan Denpasar Selatan, maka harga lahan sawah mulai melambung naik menjadi Rp 200-Rp 300 juta per are dan

terus naik hingga kini mencapai Rp. 500-Rp 800 juta per are atau bahkan bisa mencapai Rp. 1 milyar per are tergantung letak atau posisinya.

3. Tahap Debat

Tahap ini merupakan tahap terpenting dalam suatu proses negosiasi. Dengan dilakukannya debat, kita dapat mengetahui seberapa jauh kepentingan kita bisa dipertahankan atau diteruskan dan seberapa jauh kepentingan pihak lain akan kita terima. Tahap ini diisi dengan argumentasi dari masing-masing pihak. Dari argumentasi tersebut dapat terlihat strategi dan fleksibilitas pihak lain.

Dalam perjalanan proses alih fungsi lahan persawahan tidak selalu berjalan mulus. Adakalanya proses tersebut mendapat tantangan dari masyarakat setempat. Untuk itu diperlukan negosiasi yang alot atau debat dengan pemilik sawah atau bahkan dengan tokoh-tokoh adat ataupun tokoh-tokoh masyarakat. Dalam kondisi ini tidak jarang, pegawai/petugas yang berperan sebagai *sweeper* turun tangan untuk memecahkan masalah bahkan tidak menutup kemungkinan dengan menggunakan intimidasi bila diperlukan.

4. Tahap Tawar-menawar

Setelah diadakan proposal dan debat, negosiator mengadakan tawar menawar atas kepentingan pihaknya maupun pihak lain. Dalam tahap ini argumentasi sudah tidak terlalu diperlukan, yang diperlukan adalah fakta, data, dan kemampuan untuk mencapai tujuan negosiasi.

Dalam tahap ini terjadi persaingan hanya antara pengembang yang satu dengan pengembang yang lainnya. Sementara itu para petani pemilik sawah juga berusaha menaikkan harga sawahnya. Pada kondisi ini terlihat seakan-akan petani juga menyetujui terjadinya alih fungsi lahan persawahan.

5. Tahap Akhir/Penutup

Suatu negosiasi dapat berakhir dengan berbagai kemungkinan. Antara lain, negosiasi berhasil, negosiasi gagal, negosiasi ditunda, negosiasi *dead-lock*, para pihak *walk-out*, dan lainnya. Apabila negosiasi berhasil, direkomendasikan untuk membuat semacam *memorandum of understanding* (MoU) untuk keperluan para pihak menekan pihak lainnya untuk menjalankan kesepakatan hasil negosiasi (Sri, 2009: 145)

Tahap akhir dari proses alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan diakhiri dengan terjadinya alih fungsi lahan persawahan yang semakin meluas, tidak ada lagi oposisi atau perlawanan lagi, harga tanah persawahan yang mendekati stabil dan tidak ada lagi permasalahan dalam proses alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas negosiasi dipahami sebagai sebuah proses dimana para pihak ingin menyelesaikan permasalahan, melakukan suatu persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan penawaran untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu, dan atau berusaha menyelesaikan permasalahan untuk keuntungan bersama (*win-win solution*). Negosiasi biasa dikenal sebagai salah satu bentuk *alternative dispute resolution*. Dengan demikian, secara sederhana disimpulkan negosiasi adalah suatu cara bagi dua atau lebih pihak yang berbeda kepentingan baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud, atau tujuan dalam mencari kesepahaman dengan cara mempertemukan penawaran dan permintaan dari masing-masing pihak sehingga tercapai suatu kesepakatan atau kesepahaman kepentingan baik itu berupa pendapat, pendirian, maksud, atau tujuan.

Negosiasi adalah ketrampilan yang bisa dipelajari siapa saja dan banyak kesempatan untuk melatihnya. Ketrampilan ini yang diperlukan untuk negosiasi yang baik antara lain: (a) Kemampuan menentukan serangkaian tujuan namun fleksibel

dengan sebagian diantaranya; (b) Kemampuan mencari kemungkinan-kemungkinan dari pilihan yang banyak; (c) Kemampuan untuk mempersiapkan dengan baik Kompetensi interaktif, yaitu mampu mendengarkan dan menanyakan pihak-pihak lain; dan (d) Kemampuan menentukan prioritas. Negosiasi beranggapan bahwa hasil negosiasi akan selalu memuaskan kebutuhan dan keinginan kedua belah pihak yang terlibat, paling tidak hingga tingkat tertentu. Negosiasi berprinsip harus mengikuti empat dasar yaitu :

1. Memisahkan perasaan pribadi dengan masalah yang sedang dihadapi
2. Berfokus pada kepentingan bukan pada posisi
3. Mengumpulkan beberapa pilihan sebelum membuat keputusan akhir
4. Orang yang kharismatik atau vokal terdengar sangat meyakinkan selama negosiasi (Sri, 2009: 67).

Negosiasi diperlukan dalam kehidupan manusia karena sifatnya yang begitu erat dengan filosofi kehidupan manusia dimana setiap manusia memiliki sifat dasar untuk mempertahankan kepentingannya, di satu sisi, manusia lain juga memiliki kepentingan yang akan tetap dipertahankan, sehingga, terjadilah benturan kepentingan. Padahal, kedua pihak tersebut memiliki suatu tujuan yang sama, yaitu memenuhi kepentingan dan kebutuhannya. Apabila terjadi benturan kepentingan terhadap suatu hal, maka timbul lah suatu sengketa. Dalam penyelesaian sengketa dikenal berbagai macam cara, salah satunya negosiasi. Secara umum, tujuan dilakukannya negosiasi adalah mendapatkan atau memenuhi kepentingan kita yang telah direncanakan sebelumnya dimana hal yang diinginkan tersebut disediakan atau dimiliki oleh orang lain sehingga orang memerlukan negosiasi untuk mendapatkan yang diinginkan.

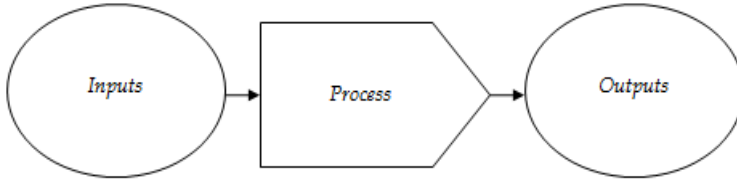
Sebelum proses alih fungsi lahan, tentunya harus dilakukan perubahan peruntukan fungsi lahan. Untuk merubah peruntukan fungsi lahan ini, yang pertama dilakukan pemilik

modal atau pengusaha adalah melakukan negosiasi dengan pihak Pemerintah Daerah setempat yang mempunyai otoritas untuk merubah peruntukan fungsi lahan tersebut.

Perusahaan-perusahaan swasta memiliki pengaruh baik secara formal maupun informal yang cukup besar dalam pengambilan keputusan peruntukan lahan, baik itu untuk lahan persawahan maupun non-persawahan. Perusahaan-perusahaan ini mengidentifikasi lahan yang mereka minati untuk dijadikan lahan yang bisa difungsikan sebagai lahan pemukiman atau tujuan komersial lainnya. Mereka kemudian mengadakan negosiasi untuk mendapatkan izin alih fungsi lahan, lalu mengupayakan pemenuhan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat merangkul warga setempat dan mengadakan negosiasi dengan pemerintah serta masyarakat pemilik lahan untuk bisa mengalihfungsikan lahan tersebut.

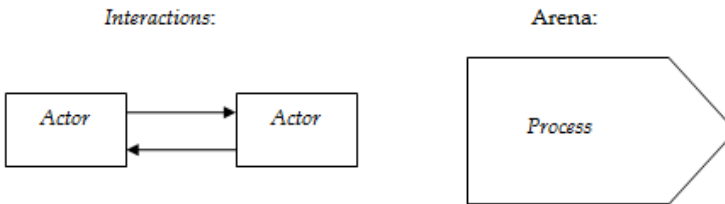
Negosiasi dengan otoritas pemegang kekuasaan untuk merubah peruntukan fungsi lahan tentunya menggunakan uang cukup besar untuk "membeli power" tersebut. Jadi tidak mengherankan kalau wilayah Sesehan dan Pamogan yang sudah ditetapkan sebagai lumbung beras di Kecamatan Denpasar Selatan, dapat digunakan untuk pembangunan pemukiman dan fungsi komersial lainnya.

Menurut Brassers (2004:31) dalam implementasi suatu kebijakan publik tidak terlepas dari sistem sebuah kebijakan, apakah kebijakan berlangsung dengan sempurna atau tidak. Unsur suatu sistem ditekankan pada unsur input-process-output. Input merupakan masukan suatu sistem yang dapat berupa zat, energi, manusia atau informasi. Ia merupakan kekuatan yang menggerakkan dan memberikan kepada sistem yang bersangkutan apa yang diperlukan untuk beroperasi. Proses merupakan aktivitas yang mentransformasikan input menjadi output. Output merupakan hasil pengoperasian proses atau dengan kata lain merupakan tujuan dari adanya sistem yang bersangkutan. Hubungan input, proses dan output ini dapat digambarkan sebagai berikut:



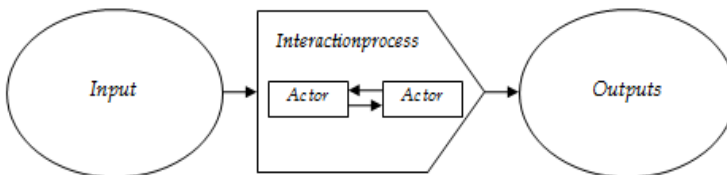
Gambar 4.3 Skema Hubungan *Inputs*, *Process* dan *Outputs* (Brassers, 2004:31)

Dalam gambar tersebut beberapa input merupakan beberapa hal yang baru dan berbeda. Brassers (2004:35) menyatakan dalam hal realitas sosial yang dipandang sebagai suatu proses merupakan aktivitas dan interaksi dari beberapa aktor, yang bisa berupa orang yang merepresentasikan dirinya sendiri dan/atau organisasi. Beberapa interaksi ini disebut "arena" dan digambarkan sebagai berikut:



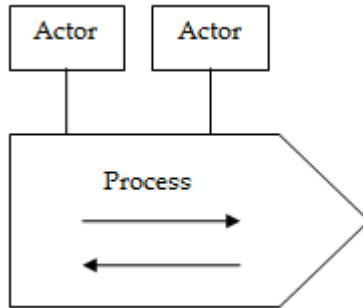
Gambar 4.4 Interaksi dalam Arena yang Membentuk *Process* (Brassers, 2004:35)

Hasil dari interaksi aktor-aktor dalam membentuk process menghasilkan skema sebagai berikut:



Gambar 4.5 Interaksi *Process* Terkait Diantara Fenomena (Brassers, 2004: 37)

Interaksi yang digambarkan dalam skema di atas hanya berdasarkan 2 *actors*. Dalam kehidupan nyata, tentunya proses interaksi tersebut bisa lebih dari 2 *actors* aktif. Dalam beberapa model *process*, bisa saja saja aktor berada di luar proses yang memungkinkan beberapa aktor dapat berinteraksi sekaligus, seperti digambarkan sebagai berikut:

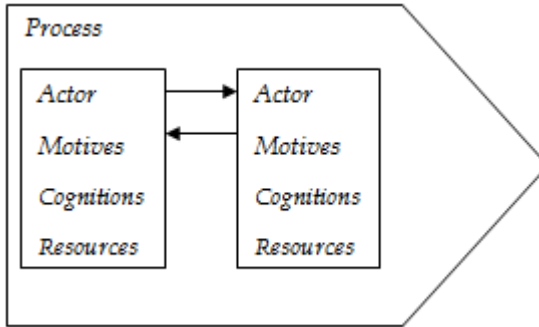


Gambar 4.6 *Process Model* dengan Aktor di Luar Proses (Brassers, 2004: 39)

Process Model yang digambarkan di atas merupakan kerangka awal dari model atau teori interaksi kontekstual (*contextual interaction theory*) dari Brassers. Tantangan untuk mencapai pemerintahan bersama yang keheren memerlukan model analisis kebijakan yang keluar dari pendekatan standar yang seringkali terpancang pada superioritas fungsional. Pemerintahan adalah sekumpulan proses interaksi yang pertama dan paling utama yang di dalamnya terdapat beberapa permainan simultan antara beberapa aktor. Posisi para aktor dalam permainan-permainan tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh orang lain dalam kasus tertentu, tetapi juga oleh kebijakan publik dan properti serta hak-hak guna yang membentuk konteks yang lebih struktural. Di seputar hal-hal tersebut, konteks yang bahkan lebih luas, kultural, ekonomis, teknologis, lingkungan hidup dan lain-lain membentuk susunan tersebut.

Terdapat berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi pelaksanaan dan hasil dari suatu proses interaksi. Tetapi karena proses-proses interaksi adalah aktivitas-aktivitas manusia, semua pengaruh mengalir melalui

karakteristik penting dari para aktor yang terlibat dalam suatu implementasi kebijakan. Dalam gambar berikut dimasukkan faktor-faktor (input dan output dari proses tidak ditunjukkan dalam gambar tersebut).



Gambar 4.7 Model proses dengan karakteristik perilaku yang digunakan dalam Teori Interaksi Kontekstual (Brassers, 2004:42).

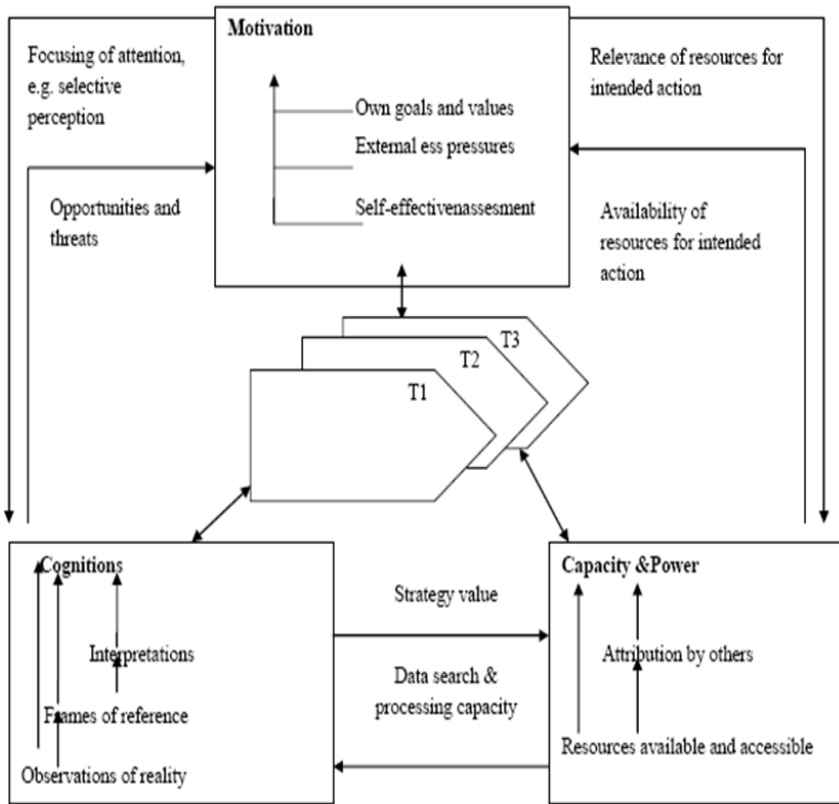
Asumsi dasar dari Teori Interaksi Kontekstual adalah sangat sederhana. Terdapat suatu interaksi yang dinamis antara karakteristik pelaku-utama (yang dalam hal ini adalah pemerintah) yang menggerakkan proses-proses interaksi sosial dalam suatu kebijakan publik dan pada gilirannya dibentuk kembali dengan proses tersebut. Asumsi-asumsi utama dari teori ini adalah:

1. Proses-proses kebijakan adalah proses interaksi pelaku.
2. Beberapa faktor memiliki pengaruh tetapi hanya karena dan sejauh mereka mengubah karakteristik relevan dari para pelaku yang terlibat.
3. Lapisan pertama dari faktor semacam ini dijelaskan dalam kotak-kotak dari gambar 2 dibawah ini, termasuk bagaimana mereka dipengaruhi oleh sejumlah faktor-faktor lain dari dalam atau dari luar proses tersebut.
4. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah: motivasi mereka, pengertian mereka (informasi dianggap benar), dan kemampuan serta kekuatan mereka (Bressers, 2004: 15).

Ketiga karakteristik tersebut sedang mempengaruhi satu sama lain, tetapi tidak dapat dibatasi pada dua atau satu tanpa kehilangan banyak wawasan. Karakteristik-karakteristik dari para aktor membentuk proses, tetapi pada gilirannya juga dipengaruhi oleh pelaksanaan dan pengalaman dalam proses tersebut dan oleh karenanya secara bertahap dapat berubah selama proses tersebut. Karakteristik-karakteristik dari para aktor juga dipengaruhi dari suatu konteks eksternal tentang rezim pemerintah (juga, lembaga-lembaga dan hubungan jaringan yang lebih atau kurang stabil, tetapi juga properti dan hak-hak guna.

Di seputar konteks tersebut masih ada lagi siklus yang mencakup konteks politik, sosio-kultural, ekonomis, teknologis, lingkungan hidup dan masalah-masalah lainnya. Pengaruh mereka pada karakteristik-karakteristik aktor bisa terjadi langsung maupun tidak langsung melalui rezim pemerintahan. Gambar di atas menunjukkan perkembangan proses (proses-proses perubahan- dalam bentuk proses-proses seiring waktu). Karakteristik para aktor lebih terperinci disini, tidak ditampilkan sebagai terkait dengan para aktor khusus dan untuk alasan-alasan presentasi yang ditempatkan di luar kotak proses tersebut. Kemungkinan juga bisa menunjukkan saling pengaruh antara faktor-faktor dan proses itu sendiri.

Model dari Teori Interaksi Kontekstual yang diuraikan di atas, dapat digambarkan dalam bagan berikut:



Gambar 4.8 Interaksi dinamis antara karakteristik-pelaku utama yang menggerakkan proses-proses interaksi sosial dan pada gilirannya dibentuk kembali oleh proses tersebut.

Kotak "motivasi" dari gambar di atas menjadi awal dari motivasi bagi aktor, termasuk untuk posisi yang diambil dalam proses-proses interaksi yang berperan kuat disini. Tetapi nilai yang juga lebih altruistik dapat secara langsung membawa pada sasaran-sasaran yang sesungguhnya (Gatersleben dan Vlek 1998: 27). Tekanan-tekanan eksternal dapat juga menjadi suatu kekuatan pendorong. Seperti halnya semua faktor pendorong mereka pada intinya dapat juga dikonseptualisasi sebagai "milik" dari tujuan-tujuan "milik" seseorang. Namun, kemungkinannya besar bahwa dalam analisis praktis konseptualisasi semacam ini akan menjadikan mereka terlupakan atau dikesampingkan. Tekanan-tekanan tersebut juga didasarkan pada kekuatan, tetapi bahkan lebih sering akan menjadi pengaruh yang lebih lunak dari penerimaan normatif dari legitimasi dari kebijakan-kebijakan eksternal semacam itu dan bahkan dengan identifikasi bersama kelompok dari mana harapan-harapan semacam ini berasal. Hal yang terakhir sebagai suatu faktor pendorong juga "penilaian efektivitas diri" (Bandura 1986: 56) dapat memainkan suatu peran besar. Konsep tersebut menunjuk pada efek yang melumpuhkan yang dapat terjadi ketika seorang aktor menerima perilaku yang dipilihnya sebagai di luar kapasitasnya. Hal ini menunjukkan bagian dari hubungan antara motivasi dan ketersediaan sumberdaya, sumberdaya milik sendiri atau sumberdaya yang disediakan oleh orang lain.

Kotak "kesadaran" berdasarkan pada pemikiran bahwa pengenalan dari para aktor (penafsiran mengenai realita yang dianggap benar) tidak hanya merupakan suatu urusan tentang pengamatan dan kapasitas pemrosesan informasi, meskipun aspek-aspek tersebut adalah penting dan dengan revolusi teknologi informasi terdapat sumber perubahan yang cepat. Dalam ilmu kebijakan apa yang disebut "pergantian argumentatif" (Frank Fischer 1995: 46), merefleksikan suatu pendekatan yang menekankan bahwa pengetahuan dihasilkan sendiri dalam saling interaksi, berdasarkan pada penafsiran tentang realita dari para aktor, bahwa mereka sendiri

dijembatani oleh kerangka referensi. Beberapa kerangka referensi disebut oleh Axelrod (1979: 93) sebagai “peta-peta kognitif”, oleh Schön (1983: 101) sebagai “kerangka”, oleh Sabatier dan Jenkins-Smith (1999: 154) sebagai “keyakinan inti kebijakan” dan “keyakinan inti mendalam”. Dryzek (1997: 131) berbicara mengenai “diskursi”, sehingga juga menekankan keterkaitan bahasa tentang pemahaman dan peran kata, satu baris, cerita dan semacamnya untuk memandu, tetapi juga untuk membatasi dan mencondongkan pemahaman. Sementara pendekatan-pendekatan tersebut sangat berbeda dalam pemahaman konseptual mereka, mereka juga membagi pemahaman yang sama: bahwa kesadaran bukan hanya tentang informasi faktual, melainkan lebih pada penafsiran tentang realita, dan bahwa penafsiran tersebut dipengaruhi oleh penyaring-penyaring, kerangka dan interaksi dengan orang-orang lain. Hal ini yang disusun dalam kotak “pengertian” dari teori interaksi kontekstual seperti yang digambarkan tersebut di atas.

Sementara sumberdaya sebagai suatu karakteristik aktor adalah hal penting untuk memberikan kapasitas untuk bertindak, dalam susunan hubungan dari suatu proses interaksi mereka juga relevan sebagai sumber kekuatan. Oleh karena itu gambar di atas disebut sebagai kotak “kemampuan dan kekuatan”. Hubungan antara kekuatan dan sumberdaya tidak selalu langsung. Kekuatan terjadi dalam sebagian besar sebagai suatu hasil pertalian dengan seorang aktor oleh aktor lain. Namun ketika pertalian ini tidak didukung oleh sumberdaya nyata maka ini jauh dari stabil. Sumberdaya yang merupakan akar dari kekuatan mencakup lebih banyak dibandingkan aturan formal, meskipun hak-hak hukum dan aturan-aturan kelembagaan lain dapat menjadi suatu bagian penting darinya, selanjutnya untuk sumberdaya seperti uang, orang-orang yang terampil, waktu dan kesepakatan. Bukan hanya sumberdaya aktor itu sendiri, tetapi lebih lagi ketergantungan dari seorang aktor pada sumberdaya dari dari aktor lain membentuk keseimbangan dari kekuatan. Contoh dalam terjadinya alih

fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian adalah ketergantungan otoritas pemerintah pada pekerjaan-pekerjaan yang diciptakan oleh suatu industri atau suatu bisnis, yang mana industri atau bisnis tersebut dapat menggunakannya sebagai sumber dari kekuatan negosiasi untuk merubah kebijakan di seputar tata ruang sesuai keinginan para aktor pemilik modal. Sumberdaya yang dalam hal ini berupa "uang" bukan hanya membentuk hubungan kekuatan, tetapi juga merupakan suatu prasyarat untuk menentukan kemampuan untuk bertindak dari aktor lain yang dalam hal ini adalah pemerintah yang memiliki sumber daya berupa "kekuasaan". Dalam kasus alih fungsi lahan, sumberdaya berupa "uang" yang dimiliki oleh aktor dari kalangan pemilik modal tersebut dapat menggerakkan aktor pemerintah dengan sumber daya yang dimiliki berupa "kekuasaan" untuk merubah kebijakan RTRW suatu daerah menjadi yang diinginkan oleh aktor pemilik modal. Hal inilah yang menjadi "motivasi" para aktor yaitu untuk mendapatkan "uang" bagi aktor pemerintah dan untuk mendapatkan tanah dengan peruntukkan yang diinginkan oleh para aktor dari kalangan pemilik modal.

Selanjutnya para pemilik modal itu melakukan negosiasi dengan warga masyarakat agar mau melepaskan lahan persawahannya untuk digunakan sesuai dengan keinginan para pemilik modal tersebut. Ada 2 (dua) cara yang dilakukan oleh para pemilik modal tersebut. Pertama, mereka melakukan negosiasi dengan pemuka-pemuka masyarakat baik yang formal maupun para pemuka adat. Namun demikian, walaupun para pengguna pemuka masyarakat dilibatkan dalam konsultasi, minat mereka serta kemampuan mereka untuk menegosiasikan perubahan-perubahan peruntukkan lahan bergantung pada tingkat solidaritas di dalam suatu masyarakat dan apakah mereka mengambil keputusan secara kolektif atau melalui pemuka-pemuka masyarakat atau tidak. Untuk Desa Pemogan yang tingkat solidaritas masih tinggi dan masih mengambil keputusan secara kolektif, cara ini seringkali berhasil. Namun untuk Kelurahan Pedungan dan Kelurahan

Sesetan yang masyarakatnya cenderung lebih individualistis, cara ini acapkali gagal.

Kedua, melakukan negosiasi secara individual yaitu dengan iming-iming untuk membeli lahan persawahan mereka dengan harga tinggi. Cara inilah yang digunakan untuk mengalihfungsikan lahan persawahan di Kelurahan Pedungan dan Kelurahan Sesetan. Untuk masyarakat yang telah terlibat dengan pasar-pasar komersial, seperti halnya masyarakat di Kelurahan Pedungan dan Sesetan, semakin tinggi keterlibatan dapat mengarah ke meningkatnya kecenderungan untuk menukar lahan dengan kompensasi yang menurut pemilik lahan cukup tinggi. Demikian juga bila dikaitkan dengan mata pencarian atau penghidupan alternatif tersedia bagi masyarakat. Mereka yang terbatas alternatif penghidupannya semakin besar kemungkinannya untuk menegosiasikan perubahan fungsi lahan atau bahkan yang dapat menghilangkan hak masyarakat atas suatu lahan (terutama pengalihan fungsi lahan).

Hal tersebut diungkapkan I Wayan Mardia, Pekaseh Subak Kepaon dan Petani, penduduk Desa Pemogan sebagai berikut:

Sangat sulit, Sekarang ini sangat susah jadi petani mengolah sawah karena pendapatan sangat minim sekali, kalau saya contohkan satu are hanya dapat 100 ribu dalam kurun waktu 110 hari. Pendapatan per are hanya 300 ribu, Kenapa petani dapat 100 ribu, karena pembagiannya 100 ribu untuk pemilik tanah, 100 ribu untuk ongkos-ongkos seperti sewa traktor, ongkos tanam, ongkos panen. Beda pada zaman dulu petani dalam mengolah sawah mempergunakan sapi, tanam padi dengan gotong royong, waktu pengerjaannya atau prosesnya yang lama, Kalau pake sapi pengerjaan lahan bisa sampai 20 hari, sedangkan pakai traktor hanya hitungan hari. Tapi sekarang serba cepat dan gampang, mengolah sawah sudah pake traktor dengan cara sewa, tanam padi dengan cara ngongkosin.. sehingga itu yang membuat petani penghasilannya kecil, kalau ingin penghasilan tinggi, jangan tanggung-tanggung jadi petani, minimal menggarap tanah

sawah 1 hektar, baru akan mendapatkan hasil yang lumayan, kalau jadi petani hanya menggarap 25 are, tidak akan bisa hidup. Apalagi kalau cuma punya 2-3 are saja. Seperti tetangga saya yang mendapat warisan 3 are sawah di daerah Pedungan. Dari pada dipakai bertani tidak ada untungnya, ya dia jual saja, pumpung ditawarkan oleh pengembang untuk dibeli dengan harga tinggi. Dengan hasil penjualan tanah itu dia bangun rumah, ya, tidak di daerah sini, tapi di pinggiran. Rumahnya sekarang luasnya 10 are, bisalah dia membangun dengan konsep Asta Kosala Kosali, yang memang diidamkan orang Bali, kalau membangun rumah (hasil wawancara dengan I Wayan Mardia, Pekaseh Subak Kepaon dan Petani, penduduk Desa Pemogan, pada tanggal 5 Agustus 2015).

Hampir senada dengan yang disampaikan oleh I Wayan Mardia tersebut di atas, I Komang Suariga, penduduk di Kelurahan Sesetan menyatakan:

Saya punya sawah cuma 5 are, saya mendapat iming-iming dari seorang pemilik modal, kalau saya mau melepas tanah saya, akan dibelinya dengan harga tinggi. Sementara itu saya masih tinggal dengan keluarga dan kepingin membangun rumah lengkap sesuai adat Bali dan itu perlu tanah yang luas. Ya saya jual-lah sawah itu. Saya belikan tanah di daerah Sangeh. Sekarang saya sudah punya rumah sendiri, yang sesuai dengan adat Bali seperti yang saya inginkan. Sawah saya yang saya jual di Sesetan itu, sekarang sudah berubah menjadi ruko entah untuk apa saya nggak tahu lagi (hasil wawancara dengan I Komang Suariga, penduduk di Kelurahan Sesetan, pada tanggal 29 November 2015).

Pelaksanaan proses negosiasi sering diartikan secara ambigu dalam upayanya untuk melindungi hak-hak masyarakat. Kesempatan-kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses persetujuan bebas dan tanpa paksaan dalam alih fungsi lahan seringkali sangat minim. Manakala masyarakat dilibatkan dalam negosiasi, kebutuhan mata pencarian mereka seringkali membatasi kekuatan negosiasi

mereka. Masyarakat yang memiliki sedikit sekali kendali atas lahan, masyarakat yang tingkat solidaritasnya rendah, kurang akses ke jalan atau infrastruktur lainnya, serta masyarakat yang terbatas alternatif mata pencariannya berada pada posisi yang lemah dalam tawar-menawar.

C. Alih Fungsi Lahan Persawahan melalui Oposisi

Alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan tidak terjadi begitu saja. Pada awalnya alih fungsi lahan persawahan tersebut terjadi melalui proses oposisi. Oposisi ini merupakan bentuk dari kontra hegemoni yang menurut Gramsci disebut sebagai *counter hegemony*. Kontra hegemoni adalah ketidaksetujuan atau penentangan atas pemerolehan keunggulan atau supremasi melalui kepemimpinan intelektual dan moral atas dukungan kekutan dan persetujuan. Kontra hegemoni merupakan bentuk perlawanan masyarakat atas peraturan yang ditetapkan pemerintah selaku aparat negara melalui perangkat negara represif maupun perangkat negara ideologis. Dalam hal ini, kontra hegemoni masyarakat atau terjadinya alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan merupakan reaksi ketidaksetujuan atau penentangan masyarakat atas terjadinya alih fungsi lahan persawahan tersebut. Alih fungsi lahan persawahan ini oleh masyarakat dianggap pemilik modal telah menghegemoni bahkan mendominasi keputusan masyarakat untuk mengalihkan lahannya, sehingga memunculkan kontra hegemoni atau ketidaksetujuan dan penentangan di kalangan masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan.

Kontra hegemoni masyarakat atas terjadinya alih fungsi lahan persawahan di Kecamatan Denpasar Selatan merupakan ketidaksetujuan, penentangan, atau reaksi atas terjadinya alih fungsi lahan tersebut yang bersifat menghegemoni. Masyarakat selaku pihak yang dihegemoni mengekspresikan ketidaksetujuannya melalui perilaku represif maupun simbolik. Dengan demikian, kontra hegemoni masyarakat dibatasi sebagai ketidaksetujuan kehidupan kolektif manusia yang tinggal di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan. Selaku

masyarakat, mereka berinteraksi secara intensif berdasarkan pola ikatan tingkah laku khas yang diatur dalam sistem norma dan corak budaya yang sama yakni budaya masyarakat Bali pada umumnya dan masyarakat Kecamatan Denpasar Selatan.

Proses oposisi atau kontra hegemoni ini terdiri dari tahap oposisi frontal, tahap oposisi diam-diam hingga tahap pragmatis. Dalam tahap oposisi frontal, petani tidak mau melepaskan/menjual sawahnya untuk dialihfungsikan. Alasannya jika sawahnya dijual terus mereka akan bekerja apa atau mau dapat mata pencaharian dari mana. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan Made Wijaya, petani yang bertempat tinggal di Tukad Petanu, yang sampai sekarang tidak mau menjual sawahnya, yang petikan wawancaranya sebagai berikut :

Dari dulu sampai sekarang, sejak mulai terjadi alih fungsi persawahan, yang di sini berubah menjadi perumahan, saya tetap tidak mau melepaskan atau menjual sawah saya. Sawah ini dimiliki turun temurun dalam keluarga saya, dari kakeknya kakek saya, sawah ini menjadi sumber penghasilan keluarga saya. Kalau saya jual terus keluarga kami akan mendapatkan penghasilan dari mana ? saya khawatir, kalau sawah saya jual, terus hasil penjualan habis untuk beli ini, beli itu, yang gak penting, terus habis, gimana. Tinggal gigit jari kan? Ya, sudah saya pertahankan sawah saya untuk tidak saya jual (Hasil wawancara dengan Made Wijaya, petani yang bertempat tinggal di Tukad Petanu, pada tanggal 29 November 2015)

Hal senada juga diungkapkan oleh Nyoman Artana, petani dari Desa Pemogan yang kutipan wawancaranya sebagai berikut :

Sawah ini harta pusaka keluarga saya yang harus saya jaga sebagai sumber penghasilan keluarga. Kalau saya jual, kami akan kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan. Saya tidak mau itu. Keluarga sayapun sepakat untuk mempertahankan sawah yang ada. Jadi, ya, tidak saya jual hingga sekarang (Hasil wawancara dengan Made Wijaya, Nyoman Artana,

petani dari Desa Pemogan, pada tanggal 22 Desember 2015)

Berdasarkan hasil wawancara di atas terlihat bahwa dalam tahap oposisi frontal ini petani tidak mau melepaskan sawahnya. Para petani itu berpendapat menjual sawahnya akan berakibat kehilangan pekerjaannya, kehilangan mata pencahariannya. Hal inilah yang menyebabkan para petani pada awalnya tetap mempertahankan sawahnya.

Selanjutnya dalam tahap oposisi diam-diam, sebagian petani masih mempertahankan tanahnya. Para petani memilih untuk tidak ikut euforia menjual sawah karena tergiur dengan harga yang tinggi dan menggunakan hasil penjualan sawah untuk membeli barang-barang mewah dan hidup berfoya-foya. Hal ini diungkapkan oleh Ketut Murdana, petani di Kelurahan Pedungan dalam wawancara sebagai berikut :

Memang saya akui, dengan harga yang sudah membung tinggi, hasil penjualan sawah bisa saya gunakan untuk membeli apa saja. Tapi setelah itu, setelah uang habis terus bagaimana ? untuk itu saya memilih diam-diam saja, tidak menolak adanya penjualan sawah untuk dijadikan perumahan. Saya memilih untuk tidak menjual sawah saya, biarlah harga tinggi itu dinikmati tetangga-tetangga saya (Hasil wawancara dengan Ketut Murdana, petani di Kelurahan Pedungan, pada tanggal 3 Desember 2015)

Hal yang sama juga dikatakan oleh Wayan Braja, petani dari Kerta Dalem sebagai berikut :

Saya tidak ikut-ikutan menjual sawah saya. Bukannya menolak adanya alih fungsi sawah untuk pembangunan perumahan. Tapi sawah adalah tumpuan mata pencaharian saya sekeluarga. Jadi saya diam-diam saja, biarlah yang menjual sawahnya menikmati dan menerima akibatnya (Hasil wawancara dengan Wayan Braja, petani dari Kerta Dalem, pada tanggal 7 Desember 2015).

Dari wawancara di atas dapat dikatakan bahwa masih ada petani yang tidak mau menjual sawahnya. Namun demikian, jumlah petani yang mempertahankan sawahnya jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan petani yang menjual sawahnya untuk dialih fungsikan ke fungsi non pertanian. Hal ini memadai bahwa petani di Kecamatan Denpasar Selatan sudah sampai pada tahap oposisi pragmatis dimana petani justru menikmati saja harga yang tinggi dari penjualan sawah mereka. Mereka tidak peduli sawahnya mau dijadikan apa, yang penting mereka bisa menikmati hasil penjualan sawah tersebut.

Proses alih fungsi lahan persawahan menjadi fungsi lain yang terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan khususnya di Kelurahan Sesetan, Pedungan dan Desa Pemogan meskipun kelihatannya belum ada indikasi adanya perlawanan, dalam kajian ini ditemukan adanya penolakan tapi tidak berkembang menjadi suatu perlawanan terbuka, namun ternyata ada juga proses oposisi yang menyertainya. Sebelum membahas lebih jauh mengenai oposisi yang terjadi tersebut, akan dibahas terlebih dahulu arti oposisi itu sendiri.

Dalam pembahasan mengenai proses oposisi atas alih fungsi lahan persawahan menjadi fungsi non-pertanian yang terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan, oposisi dapat diartikan sebagai perlawanan. Namun kondisi tertentu, oposisi ini juga dapat diartikan sebagai resistensi. Agar tidak terjadi perdebatan peristilahan maka dalam pembahasan mengenai oposisi ini, akan digunakan istilah oposisi, resistensi ataupun perlawanan secara bergantian sesuai dengan konteks yang sedang dibahas.

Menurut Scott (1991) definisi resistensi adalah setiap semua tindakan para anggota kelas masyarakat yang rendah dengan maksud melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan (misalnya sewa, pajak) yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas (misalnya tuan tanah, negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutannya sendiri (misalnya pekerjaan,

lahan, kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas atasan ini.

Bentuk resistensi sangat beragam dan dapat dilihat adalah suatu bentuk ketidakpatuhan, penolakan terhadap kondisi yang mereka tidak sukai. Bentuk resistensi secara diam-diam atau terselubung dari eksploitasi adalah lebih umum daripada melawan secara terang-terangan (Alisjahbana, 2005:22-23).

Perlawanan atau oposisi dengan diam-diam inilah yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya di Kelurahan Pemogakan, Pedungan dan Sestan, sebagaimana dituturkan oleh I Nyoman Santika, seorang informan yang bertempat tinggal di Kelurahan Pedungan sebagai berikut:

Pernah suatu kali, di wilayah kami akan dibangun suatu pusat pembelanjaan. Kami menyadari pusat pembelanjaan itu akan mematikan warung-warung di sekitarnya yang dimiliki masyarakat sini. Tapi kami bisa apa, kalau pihak pemilik modal sudah mengantongi izin usaha dan tanah itu memang dibelinya secara sah. Yang kami lakukan waktu itu sederhana saja. Setiap kali pemilik modal memasang kisi-kisi pondasi, malamnya kami cabuti. Begitu seterusnya, sehingga pihak pemilik modal menjadi bosan. Karena dia merasa tak berdaya menghadapi ulah kami dan mungkin juga karena dia tidak mau bertentangan dengan kami secara frontal, akhirnya pemilik modal mengalihkan proyeknya ke tempat lain yang kami tidak tahu (hasil wawancara dengan I Nyoman Santika, seorang informan yang bertempat tinggal di Kelurahan Pedungan, pada tanggal 3 Desember 2015).

Oposisi secara diam-diam yang dilakukan masyarakat petani di Kecamatan Denpasar Selatan tidak hanya itu saja, bahkan juga dibantu oleh petugas di Kecamatan Denpasar Selatan, yang mengungkapkan hal sebagai berikut:

Alih fungsi lahan pasti lambat laun akan terjadi, namun khusus pada jalur hijau agar tidak terjadi alih fungsi lahan, bilamana pemerintah konsisten artinya bahwa pemerintah harus bersinergi dengan *steakholder* yang

lainnya, apakah itu PLN, padam dan seterusnya mau bersinergi, saya yakin alih fungsi lahan tidak akan terjadi. Contoh seperti PLN, bila ada orang yang ingin membangun pada daerah jalur hijau, jangan dikasih aliran listrik sehingga bangunan itu menjadi gelap, tidak mungkin yang punya bangunan akan mempergunakan *genset* karena biaya tinggi. Kalau kebijakan PLN menerapkan hal tersebut saya yakin tidak akan ada yang membangun pada jalur hijau, disatu sisi sekuat apapun aturan yang dibuat, tapi kalau PLN masuk, maka pembangunan akan berjalan terus. Jadi disini kata kuncinya adalah listrik, bagaikan manusia bilamana tidak ada jantung maka manusia itu akan mati, begitu juga dalam hal membangun, bila PLN tidak memberikan listrik pada pembangunan pada jalur hijau maka pembangunan itu tidak akan terjadi (hasil wawancara dengan salah satu petugas di Kecamatan Denpasar Selatan yang tidak mau disebut namanya, pada tanggal 29 November 2015).

Perlawanan diam-diam juga di lakukan dengan cara melaporkan secara diam-diam kepada petugas di Kecamatan Denpasar Selatan. Hal itu terungkap dalam wawancara sebagai berikut :

Sudah ada laporan dari petani maupun pekaseh datang ke kantor saya melaporkan ada pembangunan, tetapi sebatas laporan saja karena lahan yang dibangun itu adalah lahan miliknya, saya tidak bisa melarang orang membangun dilahannya sendiri, pernah ada kejadian, ada orang membuat tanah kaplingan, dia buat jalan sendiri, kemudian pekasehnya melapor kekantor, setelah saya ke lapangan bahwa lahan yang dijadikan kaplingan tersebut adalah lahan miliknya sendiri, sehingga saya tidak bisa berbuat banyak (hasil wawancara dengan salah satu petugas di Kecamatan Denpasar Selatan yang tidak mau disebut namanya, pada tanggal 29 November 2015).

Hasil wawancara-wawancara di atas merupakan contoh oposisi diam-diam yang dilakukan masyarakat yang membuahkan hasil yaitu gagalnya alih fungsi lahan yang

dilakukan oleh pemilik modal maupun pemerintah. Namun seringkali oposisi diam-diam ini lebih banyak gagalnya dari pada yang berhasil sebagaimana diinformasikan oleh Ni Wayan Astiti, penduduk dari Desa Pemogan, sebagai berikut:

Kami pernah mencoba melawan secara diam-diam pihak pengembang yang mau membangun perumahan di daerah kami. Dengan berbagai cara kami diam-diam mencoba menggagalkan rencana pembangunan tersebut. Tapi kami gagal. Manalah bisa kami melawan pemilik modal yang di-*beckingii*-i pemerintah. Ya, gagal-lah. Pembangunan perumahan itu tetap berjalan, kami yang capek dengan sendirinya (hasil wawancara dengan Ni Wayan Astiti, penduduk dari Desa Pemogan, pada tanggal 7 Desember 2015).

Hal itu dibenarkan oleh I Putu Sanjaya (bukan nama sebenarnya), salah satu petugas di Kecamatan Denpasar Selatan yang kutipan wawancaranya sebagai berikut:

Pernah ada laporan dari petani maupun pekaheh datang ke kantor saya melaporkan ada pembangunan, tetapi sebatas laporan saja karena lahan yang dibangun itu adalah lahan miliknya, saya tidak bisa melarang orang membangun di lahannya sendiri, pernah ada kejadian, ada orang membuat tanah kaplingan, dia buat jalan sendiri, kemudian pekahehnya melapor ke kantor, setelah saya ke lapangan bahwa lahan yang dijadikan kaplingan tersebut adalah lahan miliknya sendiri, sehingga saya tidak bisa berbuat banyak (hasil wawancara dengan I Putu Sanjaya (bukan nama sebenarnya), salah satu petugas di Kecamatan Denpasar Selatan, pada tanggal 29 November 2015).

Oposisi atau resistensi rakyat menurut Scott dapat dibedakan menjadi 2 kategori yaitu resistensi yang disebabkan oleh penyebab secara langsung dan penyebab tidak langsung. Resistensi rakyat karena penyebab secara langsung seperti penindasan, ancaman, tekanan, paksaan yang dilakukan oleh tuan tanah, pemerintah, pemilik modal atau pihak lain. Resistensi yang secara tidak langsung dilakukan melalui perlawanan secara sembunyi-sembunyi. resistensi secara

sembunyi-sembunyi mapu mencapai hasil yang lebih besar dibandingkan resistensi yang dilakuakn secara terang-terangan (Alisjhbana, 2005:39-41).

Konsep resistensi yang dipakai Scoot adalah resistensi sehari-hari (*every day forms of resistance*), yaitu perjuangan yang biasa-biasa saja, namun terjadi terus-menerus. Kebanyakan resistensi dalam bentuk ini tidak sampai pada taraf pembangkangan terang-terangan secara kolektif. Senjata yang biasa digunakan oleh kelompok orang-orang yang tidak berdaya antara lain mengambil makanan, menipu, berpura-pura tidak tahu, mengumpat dibelakang, sabotase dan lainnya (Alisjahbana, 2005:37-38).

Siahaan dalam Alisjahbana (2005:90) berpendapat bahwa kaum miskin melakukan resistensi bukan karena keinginan untuk membuat kerusuhan, tetapi karena keterbatasan sarana alternatif yang mampu menyuarakan pandangan dan tekanan mereka terhadap perubahan.

Berkaitan dengan hal di atas, Bates dalam Alisjahbana (2005:19) mengungkapkan bahwa terjadinya resistensi petani di kawasan Afrika Tropis merupakan upaya suatu proses pergerakan dan pemboikotan para petani melawan kebijakan pemerintah di bidang pertanian, khususnya pangan yang dipandang sangat merugikan para petani. Pada awalnya kebijakan pemerintah ini melahirkan ketidakpuasan individu. Dalam proses selanjutnya, para individu petani yang tidak puas itu saling berkomunikasi dan berinteraksi membuat kesepakatan-kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dibuat para petani akhirnya menjadi sarana berkembangnya gerakan kolektif para petani untuk melawan.

Oposisi atau resistensi merupakan konsep yang sangat luas, walaupun demikian pada dasarnya ingin menjelaskan terjadinya perlawanan yang dilakukan kaum *subaltern* atau mereka yang terpinggirkan atau termarginalkan, karena ketidakadilan dan sebagainya. Resistensi juga dapat dilihat sebagai materialisasi atau perwujudan yang paling aktual dari

hasrat untuk menolak dominasi pengetahuan atau kekuasaan (Hujanikajenong, 2006: 176).

Eratnya pengetahuan dengan kekuasaan, bukan karena lekatnya pengetahuan dengan otoritas kebenaran, namun pengetahuan mengandung nilai untuk mengklaim dirinya benar (Haryatmoko, 2007: 7). Pendakuan dan pembakuan kebenaran tersebut akan menciptakan pembekuan makna yang menjadi bentuk-bentuk penetapan otoritas. Pemahaman ini mengakibatkan pemahaman normative terhadap kebenaran lain (Haryatmoko, 2007: 7). Kebenaran itu diciptakan dan dipelihara oleh sebuah rezim yang secara historis menciptakan kebenaran wacana.

Michel Foucault mendefinisikan pengetahuan ke dalam beberapa pengertian, di antaranya:

...knowledge is also the field of coordination and subordination of statements in which concepts appear, and are defined, applied and transformed (at this level, the knowledge of Natural History, in the eighteenth century, is not the sum of what was said, but the whole set of modes and sites in accordance with which one can integrate each new statement with the already said); lastly, knowledge is defined by the possibilities of use and appropriation offered by discourse (thus, the knowledge of political economy, in the Classical period, is not the thesis of the different theses sustained, but the totality of its points of articulation on other discourses or on other practices that are not discursive) (Foucault, 1972: 182-183).

Melalui pengetahuan tersebut, seseorang atau sekelompok orang dapat meyakinkan orang lain untuk menerima gagasan mereka. Kemampuan untuk meyakinkan orang lain berhubungan dengan kemampuan untuk menciptakan kepercayaan. Dan pada saat yang sama, orang-orang tersebut dapat mengaku sebagai yang paling berpengetahuan. Mengetahui lebih banyak tentang “yang lain” daripada orang tersebut (Fillingham, 2001: 9).

Kehidupan manusia didefinisikan sekaligus digambarkan oleh ilmu pengetahuan sembari bekerja sama dengan berbagai institusi. Pengetahuan tentang manusia ini

lalu mengkategorisasikan antara “normal” dan “tidak normal” sebagai sesuatu yang bertentangan. Dari definisi-definisi inilah pengetahuan berusaha untuk mengatur kehidupan manusia (Fillingham, 2001: 12-17). Mengacu pada gagasan Foucault ini, kita bisa melihat bagaimana kolonialisme adalah proyek untuk “menormalkan” masyarakat terjajah sebagai usaha untuk memberadabkan mereka.

Kategorisasi “normal” dan “tidak normal” di atas, juga dapat kita lihat melalui struktur bahasa. Struktur bahasa beroperasi melalui oposisi biner, misalnya “barat” dengan “timur”, “pandai” dilawankan dengan “bodoh”, “rasional” dengan “irasional”. Persoalannya, dalam oposisi biner tersebut pada saat-saat tertentu menyimpan kepentingan di mana term satu mengungguli atas term lain. Di sinilah letak kritik Derrida. Bahwa hubungan oposisi antara term yang satu dengan yang lain, adalah hubungan yang hirarkis. Permasalahan lain yang lebih banyak akan muncul ketika hubungan oposisi biner di atas bukan hanya mengakar pada kesadaran. Tapi lebih dari itu, oposisi biner dilanjutkan oleh budaya dan dilembagakan demi kepentingan tertentu (Sumarwan, 2005: 19).

Orientalisme adalah buah dari kelanjutan dari oposisi biner antara Barat dan Timur yang berjalin dengan kepentingan kekuasaan. Eksistensi timur bukan hanya sebagai wilayah secara geografis dan lawan barat dalam struktur bahasa. Timur adalah sesuatu yang diciptakan atau meminjam bahasa Said, “ditimurkan” (Said, 2001: 7). “Pen-timur-an” bukan hanya ada dalam imajinasi, namun kebutuhan untuk dominasi, hegemoni yang berakhir pada eksploitasi.

Oposisi biner dan kehendak berkuasa juga muncul dalam keseharian manusia. Oposisi biner antara laki-laki dan perempuan memunculkan budaya patriarkis, di mana term laki-laki mengungguli term perempuan. Oposisi biner antara raja dan kawula mengakibatkan dominasi total yang dilakukan oleh raja sebagai term yang lebih unggul. Daftar persoalan ini masih akan panjang jika dikaji lebih jauh. Namun dalam kajian ini yang akan dikaji adalah kelompok masyarakat petani

melawan kaum pemilik modal/kapitalis yang didukung oleh pemerintah/penguasa.

Pandangan strukturalis melihat adanya situasi-situasi sosial-ekonomi-politik tertentu yang menjadi pemicu munculnya perlawanan-perlawanan atau pemberontakan petani, termasuk revolusi yang melibatkan kaum tani sebagai ujung tombaknya. Dalam hal ini tidak terlalu tepat untuk memperdebatkan kelompok petani mana yang paling revolusioner atau lebih berpotensi untuk terlibat dalam aksi-aksi kolektif perlawanan kaum tani, karena pada kenyataannya beragam kelompok petani dapat terlibat dan menjadi aktor penting dalam sebuah revolusi sosial (Skocpol 1994: 16, Seligson 1996: 152). Jadi perhatian lebih harus diberikan pada konteks perubahan sosial-politik dimana petani kemudian menjelaskan dan menempatkan dirinya sendiri (Skocpol 1979 dan 1994: 213-239). Di atas konteks perubahan-perubahan sosial-ekonomi-politik itu kemudian bekerja suatu proses dimana terjadi 'pertukaran kepentingan' antara kelompok-kelompok petani yang terlibat dalam aksi-aksi kolektif dengan pihak-pihak yang di sini dapat disebut sebagai 'non-petani'.

Perkembangan-perkembangan dan perubahan-perubahan dalam sistem kapitalisme berikut hal-hal yang mengganggu dan merusak tatanan kehidupan masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang dari waktu ke waktu sejak abad ke-17 secara terus-menerus telah membangkitkan beragam bentuk keresahan di pedesaan dan menjadi pemicu munculnya gerakan-gerakan petani di berbagai tempat dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, seperti ditegaskan oleh Mormont (1987) dan Woods (2003), munculnya gerakan-gerakan sosial pedesaan khususnya di negara berkembang sangat berhubungan dengan karakter struktural perubahan-perubahan wilayah, penggunaan tanah dan pengerahan tenaga kerja di pedesaan. Dalam perubahan-perubahan tersebut, yang seringkali juga disebut dengan 'pembangunan', tersimpan sejumlah kontradiksi ekonomi, politik dan sosial yang

memunculkan bentuk-bentuk oposisi masyarakat pedesaan (Mormont 1987: 562).

Perubahan 'alami' hubungan desa-kota juga memberi dampak yang besar bagi radikalisme petani (Ferguson 1976). Pearse (1971) dan Mormont (1987) mengingatkan untuk lebih memperhatikan pola hubungan aktivitas pembangunan di wilayah pedesaan sebagai faktor penting yang terkait dengan aspek-aspek kebangkitan protes pedesaan yang memiliki kemiripan dengan protes sosial di perkotaan. Tekanan institusi ekonomi metropolitan, proses urbanisasi, serta fenomena perpindahan penduduk di wilayah pedesaan telah membuat kaum petani makin mudah, bahkan beradaptasi, dengan gagasan perubahan sosial yang baru termasuk bentuk-bentuk perlawanan dan protes sosial yang muncul di wilayah perkotaan. Lebih dari itu, kemunculan dan dinamika gerakan sosial pedesaan pada masa kini bahkan mencerminkan berkembang dan semakin menguatnya jaringan aksi-aksi dan aktivisme di desa dan perkotaan yang saling terhubung satu sama lain, mengikuti perkembangan alamiah dan organis dari desa-kota itu sendiri.

Pembahasan ini berusaha merekonstruksi pemaparan seputar fenomenologi menurut Alfred Schütz dan konsep perlawanan menurut Scott dalam proses alih fungsi lahan yang terjadi di Kecamatan Denpasar Selatan khususnya di Kelurahan Sesetan, Pedungan dan Desa Pemogan. Pemikiran Schütz memusatkan terhadap satu aspek dunia sosial yang disebut kehidupan-dunia (*life world*) atau dunia kehidupan sehari-hari. Inilah yang dimaksud dunia intersubjektif. Dalam dunia intersubjektif ini orang menciptakan realitas sosial dan dipaksa oleh kehidupan sosial yang telah ada dan oleh struktur kultural ciptaan leluhur mereka. Di dalam dunia kehidupan itu banyak aspek kolektifnya, tetapi juga ada aspek pribadinya (yang dapat diungkap melalui biografi). Schütz lebih memusatkan perhatian kepada dunia kesadaran intersubjektif, namun ia masih mengemukakan hasil pemikirannya tentang kesadaran makna dan motif tindakan (Basrowi, 2003:230).

Schutz mengenalkan konsep subyektivitas. Konsep ini menunjuk kepada pemisahan kesadaran umum ke kesadaran khusus kelompok sosial yang sedang saling berintegrasi. Intersubyektifitas yang memungkinkan pergaulan sosial itu terjadi tergantung kepada pengetahuan masing-masing yang diperoleh melalui pengalaman yang bersifat pribadi (subjektif). Manusia yang menjadi obyek atau sasaran penyelidikan bukan hanya sekedar obyek dalam dunia nyata yang akan diamati. Tetapi manusia itu sekaligus merupakan pencipta dari dunianya sendiri. Lebih dari itu, tingkah lakunya yang tampak secara obyektif dalam artian yang nyata itu sebenarnya hanya merupakan sebagian saja dari keseluruhan tingkah lakunya (Mustain, 2007 : 59).

Terkait dengan tindakan penolakan individu, teori moral ekonomi yang dikembangkan oleh Scott cenderung meromantisakan perlawanan atau penolakan kolektif dalam mempertahankan subsistensi atau tradisi, karena berprinsip "mendahulukan selamat". Teori ini lebih cenderung mengakui suatu perubahan yang berorientasi pada masa lalu dan masa kini. Sebaliknya teori ekonomi politik yang dikembangkan oleh Scott dan Popkin menganggap bahwa tindakan perlawanan merupakan tindakan individu petani yang lebih bernuansa rasional dan kreativitas individu atau pertimbangan ekonomi dan lebih bernuansa orientasi pada masa akan datang.

Kehidupan sehari-hari para petani oposisi atau perlawanan merupakan tindakan penolakan tidak hanya realitas tindakan yang mempertahankan substansi, tetapi juga didasarkan atas rasionalnya sendiri yang berorientasi pada masa lalu, kini, dan masa depan berdasarkan motif sebab dan motif supaya.

Rasional tidak hanya didasarkan atas aspek ekonomi tetapi juga sosial, budaya dan politik. Rasionalitas ditentukan berdasar pemahaman religius itu, jika tindakan itu bersinggungan dengan syariat agama. Hal yang disebut terakhir itu yang membedakan antara studi ini dengan studi yang telah dilakukan Scott dan Popkin. Dengan pemahaman

demikian itu, penolakan dilakukan individu demi keahlian sesungguhnya, keadilan bagi dirinya, masyarakat, dan bagi kehidupan kini dan esok. Dengan kata lain, berbagai penolakan yang dilakukan individu senyatanya membutuhkan pemahaman subjektif berdasarkan pada *pettern of thinking* dan *mind of self*, motif supaya, motif sebab, dan konteks kondisi yang melatarbelakanginya sebelum individu merealisasikan suatu tindakan penolakan (Popkin, 1986 :125).

Rasionalitas tindakan masing-masing individu tersebut tidak terlepas dari kondisi konteks yang melatarbelakangi serta pola pikir individu atau lembaga yang melingkupinya. Tindakan itu juga bermotif tujuan dan sebab yang berbeda bagi masing-masing individu. Dengan demikian, tindakan masing-masing individu adalah tindakan yang independen. Proses perubahan penerapan teknologi pertanian yang lebih rasional tersebut dimulai dari para individu yang kreatif dan inovatif dikalangan masyarakat petani. Selanjutnya, tindakan mereka itu di anut oleh masyarakat sekitarnya.

Menurut Scott, tujuan sebagian besar perlawanan petani bukanlah secara langsung mengubah system dominasi yang mapan, melainkan lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk tetap hidup dalam sistem itu. Perlawanan yang dimaksud oleh Scott adalah: "...tiap (semua) tindakan oleh (para) anggota kelas itu dengan maksud untuk melunakkan atau menolak tuntutan-tuntutan(misal sewa, pajak, dan penghormatan) yang dikenakan pada kelas itu oleh kelas-kelas yang lebih atas(misalnya tuan tanah, Negara, pemilik mesin, pemberi pinjaman uang) atau untuk mengajukan tuntutan-tuntutan sendiri (misalnya pekerjaan, lahan, kemurahan hati, penghargaan) terhadap kelas-kelas atasan ini."

Pemberontakan kecil mungkin mempunyai arti simbolis karena kekerasan serta tujuan-tujuan revolusionernya, namun bagi kebanyakan kelas bawah, secara historis episode-episode yang jarang seperti itu kurang berarti dibanding perang gerilya abadi yang berlangsung diam-diam hari demi hari (James C. Scott 1993: 270). Pada kesempatan-kesempatan

lain, perlawanan ini menjadi aktif, bahkan keras. Tetapi lebih sering perlawanan ini mengambil bentuk tidak setuju secara pasif, sabotase halus, penghindaran dan penipuan.

Gaya perlawanan yang dimaksudkan ini dengan mudah digambarkan dengan cara memperbandingkan dua bentuk perlawanan yang berpasangan, yang masing-masing diarahkan kepada tujuan yang sama yakni suatu diantaranya adalah perlawanan sehari-hari dan kedua adalah konfrontasi yang lebih terbuka dan langsung yang secara tipikal mendominasi studi tentang perlawanan. Pada suasana yang satu, proses diam-diam dan sedikit demi sedikit yang oleh koloni petani dipakai untuk memberlakukan tujuannya dan yang terang-terangan menentang hubungan kepemilikan (James C. Scott 1993 : 273).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. 2006. *Konstruksi dan Reproduksi Kebudayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdulsyani. 1987. *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*. Jakarta: Fajar Agung.
- Abdurrasyid, H. Priyatna. 2010. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Fikahati Aneka.
- Abraham, M. F. 1991. *Modernisasi di Dunia Ketiga; Suatu teori Umum Pembangunan*. M. Rusli Karim (Penerjemah). Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- Adhika, I Made. 1994. "Peran Banjar dalam Penataan Komunitas, Studi Kasus Kota Denpasar". *Disertasi ITB*, Bandung.
- Agastya, IBG. 2004. "Menghayati Hakikat Hidup dalam Orientasi Keajegan Hindu". *Bali Post* (Ed). *Ajeg Bali Sebuah Cita-cita*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Agung, A. M. Lilik. 2010. *Ketika Nurani Ikut Berbisnis*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Alisjahbana. 2005. *Sisi gelap Perkembangan Kota*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Althusser, Louis. 2010. *Tentang Ideologi : Strukturalisme Marxis, Psikoanalisis, Cultural Studies*. Yogyakarta : Jalasutra.
- Anindya Putra, Gst Putu. 1991. "Kajian Kearah Pendekatan Konsep Ruang Tradisional Bali dalam Penataan Ruang Kota dan Penerlusuran Syarat-syarat Ruang sebagai Landasan Perwujudan Ruang Kota yang Beridentitas, Studi Kasus Kota Gianyar", *Disertasi Perencanaan Wilayah dan Kota*. Institut Teknologi Bandung. Bandung.
- Anitasari, Rahayu Fery, 2008. *Pelaksanaan Alih Fungsi Lahan Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan Di Kota Semarang*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Anonim. 1983. *Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pekraman*. Denpasar: Biro Hukum Dan HAM Setda Provinsi Bali.
- Ardana, I Gst. Gde. 2007. *Inventarisasi Aspek-aspek Nilai Budaya Bali*. Denpasar: Pemda Provinsi Bali.

- Arief Budiman. 1985. *Pembagian Kerja secara Seksual : Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.
- Artadi, I Ketut. 2003. *Hukum Adat Bali*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Astika, I Ketut Sudhana. 1986. *Peranan Banjar Pada Masyarakat Bali*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- _____. 1994. "Seka Dalam Kehidupan Masyarakat Bali". Dalam *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Penerbit Bali Post.
- Atmadja, N. B. 1998. "Memudarnya Demokrasi Desa: Pengelolaan Tanah Adat, Konversi dan Implikasi Sosial dan Politik di desa Adat Julah, Buleleng, Bali". *Disertasi* (Tidak dipublikasikan). Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia.
- Bagus, I Gusti Ngurah. 1979. "Kebudayaan Bali" *Dalam Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Jambatan.
- Bandura, A. 1986. *Social Foundations of Thought and Action: a Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs, Nj: Prentice-Hall.
- Bappeda Tingkat I Bali dan Universitas Udayana. 1982. *Pengembangan Arsitektur Tradisional Bali untuk Kesenjangan Alam Lingkungan, Sikap Hidup, Tradisi dan Teknologi*. Denpasar: Bappeda Tingkat I Bali.
- Barker, Chris. 2009. *Culture Studies: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Basrowi. 2003. "Perlawanan Masyarakat terhadap Kekuasaan Kepala Desa di Kabupaten Purworejo dalam Era Transisi: Studi Perlawanan dari Perspektif Fenomenologi". *Disertasi*, Pascasarjana Unair, Surabaya.
- Bellah, R. N. 1992. *Religi Tokugawa: Akar-akar Budaya Jepang*. (Wardah Hafidz dan Wiladi Budiharja Penterjemah). Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Bobi. 2002. "Modul latihan Pelatihan Pengelolaan Perkotaan Tingkat Dasar: Permasalahan Keuangan, kelembagaan dan Peraturan". Magister Perencanaan Kota dan Daerah, UGM.

- Bourdieu, Pierre. 1983. *Language and Symbolic Power*. Cambridge : Polity.
- Brassers, Hans. 2004. *Implementing Sustainable Development: How to Know What Work, Where, When and How*. McGill-Queens University Press.
- Breman, Jan dan Gunawan Wiradi, 2004. *Masa Cerah dan Masa Suram Di Pedesaan Jawa (Studi Kasus Dinamika Sosio-Ekonomi di Dua Desa Menjelang Akhir Abad ke-20)*. Jakarta: LP3ES.
- Budihardjo, Eko. 1986. *Architectural Conservation in Bali*. Yogyakarta: Penerbit Gajah Mada University Press.
- Bungin, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Chambers, Robert. 1992. "Poverty and Livelihoods : Whose Reality Counts ?". *Journal Environment and Urbanization*, Vol. 7, No. 1.
- Coser, L.A. 1971. *Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
- Covarrubias, Miguel. 1972. *Island of Bali*. Oxford University Press.
- Damsar. 2000. *Sosiologi Ekonomi*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Darmawan, D. P., 2007. "Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani Dalam Konteks Pertanian Berkelanjutan: Suatu Analisis Programasi Linear di Pedesaan Bali, Jawa Timur dan Jogjakarta". *Disertasi*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dharmayuda, I.M.S., 2001, *Desa Adat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Bali*, Upada Sastra, Denpasar.
- Dharmayudha, I M S. dan Cantika, I W. K. 1991. *Filsafat Adat Bali*. Denpasar: Upada Sastra.
- Dhyana, Gede Winata. 2009. "Bergesernya Fungsi Lahan di Kawasan Pantai dan Perbukitan Bali". *Denpasar, Jurnal*. Vol. 12, No. 22, hlm. 12-27.
- Dryzek, John S. 1997. *The Politics of The Earth: Environmental Discourses*, New York: Oxford University Press.

- Dundes, Allan. 1968. *The Study of Folklore*. Engelwood Cliffs, N.J. Prentice Hall.
- Durkheim, E. 1965. *The Elementary Forms of the Religious Life*. New York. The Free Press.
- Endraswara, Suwardi. 2006. *Metode, Teori, dan Teknik Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta : Pustaka Widyatama.
- Etzioni, Amitai. 1982. *Organisasi-organisasi Modern*. Jakarta: UI Press Pustaka Bradjaguna.
- Evers, Hans-Dieter. 1986. "Ekonomi Bayangan, Produksi Subsisten, dan Sektor Informal: Kegiatan Ekonomi di Luar Jangkauan Pasar dan Negara". *Prisma* No. 5.
- Fahmid, Imam Mujahidin. 2004. *Gagalnya Politik Pangan Di Bawah Rezim Orde Baru, Kajian Ekonomi Politik Pangan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Studi Perkotaan (Sandi Kota) dan Institute For Social and Political Economic Issues (ISPEI).
- Fairchild, H. P. 1962. *Dictionary of Sociology*. New Jersey: Littlefield, Adams & Co.
- Fakih, M. 2002. *Jalan Lain Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Fillingham, Lydia Alix. 2001. *Foucault untuk Pemula*, terj. A. Widyamartaya. Yogyakarta: Kanisius.
- Fischer, Frank. 1995. *Handbook Analisis Kebijakan Publik: Teori, Politik dan Metode*. Bandung: Nusa Media.
- Foucault, Michel, 1997, *Disiplin Tubuh, Bengkel Individu Moder*, Yogyakarta: LKiS.
- _____. 1972. *The Archaeology of Knowledge*, terj. A.M. Sheridan Smith. London: Tavistock.
- Garna, Judistira K. 1996. *Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar-Konsep-Posisi*, Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Gatersleben, B, and Vlek C. 1998. "Measurement and Determinants of Environ-Mentally Significant Consumer Behavior", *Environment And Behavior*, Vol. 34, No. 3, pp. 335-362
- Geertz, Clifford, 1979. *Penjaja dan Raja, Perubahan Sosial di Dua Kota Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

- _____. 1976. *Involusi Pertanian, Proses Perubahan Ekologi di Indonesia (Agriculture involution)*, (Supomo, Trans.). Jakarta: Bhratara K.A.
- Geria, I Wayan. 1991. *Sistem Gotong Royong dalam Masyarakat Pedesaan Daerah Bali*. Denpasar: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- _____. 2004. "Budaya Bali dalam Seni dan Estetika". *Bali Post*.
- Giroux, H.A. 1981. *Ideology, Culture, and the Process of Schooling*. Philadelphia: Temple University Press.
- Goldthorpe, J.E. 1992. *Sosiologi Dunia Ketiga: Kesenjangan dan Pembangunan*. Sukadijo (Penerjemah). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Gorda, IGN. 1996. *Etika Hindu dan Perilaku Organisasi*. Denpasar: Widya Kriya Gematama.
- Gramsci, Antonio. 1971. *Selections from Prison Note Books*. New York: International Publisher.
- Griaddhi, I Ketut Writa. 1991. *Subak Dalam Perspektif Hukum: Dalam Subak Sistem Irigasi Tradisional di Bali*. Denpasar : Upada Sastra.
- Hall, Stuart. 1997. *Encoding-Decoding Culture, Media, Language*. London: Hutchinson.
- Harker. 2005. *(Habitus x modal) + Ranah = Praktik: Pengantar Paling Komprehensif kepada Pemikiran Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Haryatmoko. 2007. "Derrida yang Membuat Resah Rezim Dogmatis dan Kepastian", *Basis*, Nomor 11-12, Tahun ke-56, November-Desember.
- Hasan, Z. 1986. "Individual Development-Oriented Modernity and Forces Promoting it among Students at Four Teacher Training Colleges in Malang, Indonesia". *Disertasi* (tidak dipublikasikan). Florida: The Florida State University.
- Hidayaturrehman. 2014. "Petani Lokal dan Kapitalisme (Studi Respon Petani Lokal Terhadap Kebijakan Pertanian di Desa

- Nungga dan Desa Maria Kabupaten Bima)”. *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 1.
- Horton, P.B. dan Hunt, C. L. 1991. *Sosiologi. Edisi keenam*. A. Ram dan T. Sobari (Penerjemah). Jakarta: Penerbit Elangga.
- Hujanikajenong, Agung. 2006. *Resistensi Gaya Hidup; teori dan realita*, editor: Alfathri Adlin. Yogyakarta: Jala Sutra
- Husein, Ali Sofyan Husein. 2005. *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Irawan, B. 2005. *Konversi Lahan Sawah: Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya dan Faktor Determinan*. Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 21 No.2 Oktober 2003. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian, Balitbang Pertanian Departemen Pertanian.
- Jaqueline, M. Nolan-Haley. 1992. *Alternative Dispute Resolution in A Nutshell*. ST. Paul Minn : West Publishing.
- Jayadinata JT. 1999. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah* Edisi Ketiga. Institut Teknologi Bandung. Bandung.
- JBAF Mayor Polak, 1966, *Sosiologi, Suatu Pengantar Ringkas*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru.
- Jenkins, Richard. 2004. *Membaca Pikiran Pierre Bourdieu* (terj. oleh Nurhadi). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Johnson, D.P. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. R.M.Z. Lawang (Penerjemah). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kaler, I Gusti Ketut. 1983. *Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali*. Denpasar: Bali Agung.
- Kaplan dan Manner. 2000. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Jakarta: BAPPENAS.
- Khudori. 2004. *Neoliberalisme Menumpas Petani, Menyingkap Kejahatan Industri Pangan*. Yogyakarta: Resist Book.
- _____. 2005. *Lapar : Negeri Salah Urus*. Yogyakarta: Resist Book.

- Koentjaraningrat. 1974. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta : PT. Dian Rakyat
- _____. 1985. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta : Gramedia.
- _____. 1983. *Metode-metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- _____. 1987. *Sejarah Teori Antropologi Jilid I dan II*. Jakarta: UI-Press.
- _____. 2001. *Ciri-Ciri Kehidupan Masyarakat Pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Kratz, Ulrich, 1974. *Bahasa, Komunikasi, dan Kontrol Sosial, dalam Prisma 6/1974*. Jakarta: LP3ES.
- Lauer, R. H. 1989. *Perspektif tentang Perubahan Sosial*. Alimandan (penterjemah). Jakarta: Bina Aksara.
- Lawang, R.M.Z. 2005. *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik*. Cetakan Kedua. Depok: FISIP UI Press.
- Lefebvre, H. 1968. *The Sociology of Marx*. New York: Vintage.
- Lestari. 2009. *Faktor-faktor Terjadinya Alih Fungsi Lahan*. Dalam Tinjauan Pustaka Universitas Sumatra Utara.
- Liber, Rochelle. 2009. *Introducing Morphology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lubis, Akhyar Yusuf. 2006. *Dekonstruksi Epistemologi Modern, dari Posmodernisme, Teori Kritis, Poskolonialisme Hingga Cultural Studies*. Jakarta : Pustaka Indonesia Satu.
- Macfarlane, Alan. 1991. "Reflections On Peasant and Capitalist Morality". Peasant Seminar at Trinity College.
- Magnis-Suseno, F. 2001. *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mantra, I.B. 1993. *Bali: Masalah Sosial Budaya dan Modernisasi*. Denpasar: Upada Sastra.
- Mardikanto, T. 1994. *Bunga Rampai Pembangunan Pertanian*. UNS Press. Surakarta.
- Martodirdjo, Haryo S. 1991. *Orang Tugutil Di Halmahera Struktur Dan Dinamika Sosial Masyarakat Penghuni Hutan*. Bandung: Disertasi: Program Pascasarjana Unpad.

- MC Donough, Roisin dan Rachel Horrison. 1978. "Patriarchy and Relations of Production". A Kuhn dan A.M. Wolpe (ed), *Feminism and Materialism : Women and Modes of Production*. London : Routledge dan Keegan Paul.
- McKean, P.F. 1973. "Cultural In volution: Tourists, Balinese and the Process of Modernization in an Anthropological Perspective". *Disertasi* (tidak dipublikasikan). Brown University.
- Meganada, I Wayan. 1990. *Morfologi Grid Paterrn Pada Desa di Bali*. Institut Teknologi Bandung, Bandung.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis dan Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.
- Moleong, Lexy. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mormont, Marc. 1987. "The Emergence of Rural Struggles and Their Ideological Effects", *International Journal of Urban and Regional Research* 7(4), hlm. 559-578.
- Mubyarto. 2004. *Teori Ekonomi dan Kemiskinan*. Yogyakarta: Aditya Media Yogyakarta, Universitas Gajah Mada.
- Mustain. 2007. *Petani Vs Negara : Gerakan Sosial Petani melawan hegemoni Negara*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media Group.
- Nasoetion, Luthfi Ibrahim, 2003. *Konversi Lahan Pertanian: Aspek Hukum dan Implementasinya*, Jakarta: Badan Pertanahan Nasional.
- North, North DC. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*, Cambridge University Press.
- Pakpahan, A., Sumaryanto, N. Syafa'at. 2003. *Analisis Kebijaksanaan Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Nonpertanian*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor.
- Parimin, Ardi P. 1986. *Fundamental Study on Spatial Formation of Island Village, Environmental Hierarchy of Sacred-Profane Concept In Bali*. Japan: Disertasi Universitas Osaka.
- Paturusi, Syamsul Alam. 1988. "Pengaruh Pariwisata terhadap Pola Tata Ruang Perumahan Tradisional Bali". *Disertasi*, Bandung: ITB.

- Pearse, Andrew. 1971. "Metropolis and Peasant: The Expansion of the Urban-Industrial Complex and the Changing Rural Structure", dalam *Peasants and Peasant Societies*, Theodore Shanin (ed.), hlm. 69-80. Harmondsworth: Penguin Books.
- Pendit, Nyoman S. 1990. *Komodifikasi dan Komersialisasi di Bali*. Jakarta: PT. Pradana Paramita.
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2011-2031 (selanjutnya disebut Perda RT/RW Kota Denpasar).
- Picard, Michel. 2006. *Dampak Komersialisme di Bali*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Piliang, Yasraf Amir. 2009. *Hiper Realitas Kebudayaan*. Yogyakarta : LKIS.
- Pitana, I Gede, 2003. *Pengantar Ilmu Pariwisata*, Yogyakarta: Andi OFFSET.
- _____. 1994. *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*. Denpasar: Bali Post.
- Popkin, Samuel. 1986. *Petani Rasional*. Jakarta : Lembaga Penerbit Yayasan Padamu Negeri.
- Powell, Hickman, 1930. *Bali the Last Paradise*. New York: Dodd, Mead.
- Prakarsa, Eko Bagus. "Dampak Alihfungsi Lahan Terhadap Produksi Padi Sawah di Kabupaten Deli Serdang". *Disertasi Fakultas Pertanian, Universitas Sumatra Utara Medan*, 2010.
- Pudja, I Gde. 1997. *Pengantar Tentang Perkawinan Menurut Hukum Hindu*. Jakarta: Mayasari.
- Purnomo, A. M. 2007. "Strategi Nafkah Rumahtangga Desa Sekitar Hutan : Studi Kasus Desa Peserta PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) Provinsi Jawa Barat" *Disertasi, Progam Studi Sosiologi, IPB*.
- Pursika, I Nyoman dan Sukadi. 2008. "Perempuan Berstatus Purusa (Analisis Proses, Peran, Status, Pewarisan, Konflik dan Pemecahannya dalam Keluarga Nyentana di Desa Gubug Kabupaten Tabanan dan Desa Keramas, Kabupaten Gianyar, Bali)". Penelitian (tidak diterbitkan) Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha.

- Purwadi. 2005. *Upacara Tradisional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Putra, I Gusti Made. 1973. *Tata Nuntun Miwah Midabdabin Desa Adat Ring Bali*. Denpasar
- _____. 1988. *Pengaruh Pariwisata dalam Perkembangan Bangunan Perumahan Tradisional Bali di Desa Bualu*. Denpasar: Laporan Penelitian Universitas Udayana.
- Radiyta, G. Ritzer, 2011. *Ketika Kapitalisme Berjingkrang*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ratna, Nyoman Kutha. 2005. *Sastra dan Cultural Studies Representasi Fiksi dan Fakta*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- _____. 2013. *Metodologi Penelitian Kajian Budaya dan Ilmu Sosial Humaniora Pada Umumnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Redding, S. G. 1994. *Jiwa Kapitalis Cina*. (Suharsono: Alih Bahasa). Jakarta: Dinastindo Adiperkasa Internasional.
- Ripley, Randal B. 1985. *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Nelson-Hall Publisher.
- Ritzer, George dan Goodman J. Douglas. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Yakarta: Kencana.
- Sabatier, Paul A and Hank C. Jenkins-Smith, 1989. *Policy Change and Learning: An Advocacy Coalition Approach*. Boulder, Co.Schön: Westview Press.
- Said, Edward W. 2001. *Orientalisme*, terj. Asep Hikmat. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Sajogyo. 1991. *Penanggulangan Kemiskinan; Beberapa Pokok Bahasan*. Bogor: Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Bogor
- _____. 2005. *Kebijakan Pengembangan Ekonomi Daerah dalam Era Otonom*. Jakarta: Pusat Penelitian.
- Sanderson, Stephen K. 2011. *Makrososiologi : Sebuah Pendekatan terhadap Realitas Sosial*. Edisi Kedua, Terj. Farid Wajidi dan S. Menno, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,
- Sardar, Ziauddin dan Borin Van Loon. 1997. *Cultural Studies for Beginners*. Cambridge : Icon Book Ltd.

- Sardiana, I Ketut, Windia, Wayan P. dan Sudantra, I Ketut, 2011, *Peta Desa: Panduan Mengelola Konflik Batas Wilayah*, Udayana University Press, Denpasar.
- Sarwono, 1989. *Psikologi remaja*. Jakarta: Rajawali.
- Saulnier, Christine Fynn. 2000. *Feminist Theories and Social Work*. New York: The Haworth Press.
- Scott, James C. 1981. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. (tej.). Jakarta: LP3ES.
- _____. 1993. *Perlawanan Kaum Petani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. 2003. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah; Bentuk-Bentuk Resistensi Sehari-Hari Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Seligson, Mitchell A. 1996. "Agrarian Inequality and the Theory of Peasant Rebellion", *Latin American Research Review*, Vol. 31, No. 2.
- Setia, Putu. 1992. *Cendekiawan Hindu Bicara*. Denpasar: Yayasan Dharma Naradha.
- _____. 2004. "Ajeg Bali Untuk Siapa". *Bali Post*.
- Simatupang, P. dan B. Irawan. 2012. "Pengendalian Konversi Lahan Pertanian : Tinjauan Ulang Kebijakan Lahan Pertanian Abadi". *Makalah Seminar Nasional "Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian"*, 25 Oktober 2002. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Departemen Pertanian. Jakarta.
- Simon, Roger. 2004. *Gagasan-gagasan Politik Gramsci*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sirtha, I Nyoman. 2008. *Subak: Konsep Pertanian Religius Perspektif Hukum, Budaya, dan Agama Hindu*. Surabaya: Penerbit Paramita.
- Skocpol, Theda. 1979. *State and Social Revolutions: A Comparative Analysis of France, Russia, and China*. Cambridge: Cambridge University Press.
- _____. 1994. *Social Revolutions in the Modern World*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Smith, D.A. dan R.J. Nemeth. 1998. "Urban Development in South East Asia: an Historical Structural Analysis", dalam Drakakis dan Smith (ed.). *Urbanization in Developing World*. New York: Routledge.
- Soebandi, Ketut. 1990. *Konsep Bangunan Tradisional Bali*. Denpasar: Percetakan Bali Post.
- Soemardjan, Selo. 1964. *Setangkai Bunga Sosial*. Jakarta : Yayasan Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto. 2003. *Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Spivak, Gayatri Chakravorty. 1996. "Bisakah Subaltern Speak?" *Marxisme dan Interpretasi Kebudayaan*. Ed. C. Nelson dan L. Grossberg. Basingstronke: MacMillan Education.
- Sri, Dwi Rezki. 2009. *Penghapusan Merek Terdaftar*. Bandung: Alumni.
- Stopsky, F. dan Lee, S. 1994. *Social Studies in a Global Society*. New York: Delmar Publishers Inc.
- Storey, John. 2003. *Teori Budaya dan Budaya Pop Memetakan Lanskap Konseptual Cultural Studies*. Yogyakarta : Qalam.
- Sudantra, I Ketut dan Windia, Wayan P., 2012, *Sesana Prajuru Desa: Tatalaksana Pimpinan Desa Adat di Bali*, Swasta Nulus, Denpasar.
- Sudiasa, I D K. 1992. "Sosialisasi Anak dalam keluarga pada Masyarakat Bali: Studi Kasus di Kawasan Pariwisata Kelurahan Ubud Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar, Bali". *Disertasi*, IPB Bogor.
- Sudikan, Setya W. 2001. *Metode Penelitian Kebudayaan*. Surabaya: Citra Wacana.
- Sugiono, M. 1999. *Kritik Antonio Gramsci Terhadap Pembangunan Dunia Ketiga*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sujana, N. N. 2004. "Konflik Sosial di Bali: Fenomena dan Strategi Penanggulangannya". dalam I Nyoman Darma Putra (Ed). *Bali Menuju Jagaditha: Aneka Perspektif*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Sujarwa. 1998. *Manusia dan Fenomena Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Belajar

- Sukadi. 2006. "Pendidikan IPS sebagai Rekonstruksi Pengalaman Budaya Berbasis Ideologi Tri Hita Karana". Ringkasan *Disertasi* (Tidak Dipublikasikan). Bandung: UPI.
- Sukerti dan Ariani. 2014. "Perkembangan kedudukan perempuan dalam hukum adat waris Bali (Studi di kota Denpasar)". *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 6, No. 2.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Beberapa Aspek dalam Persoalan Pembangunan Daerah*. Jakarta: LPFE-Universitas Indonesia.
- Sukmawati, Emi Liandari, 2009. *Perijinan Alih Fungsi Tanah Pertanian Menjadi Tanah Non Pertanian*. Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
- Sulistyawati. 1985. *Preservasi Lingkungan Perumahan Pedesaan dan Rumah Tradisional Bali di Desa Bantas, Kabupaten Tabanan*. Denpasar: P3M Universitas Udayana.
- Sumarta, Ketut. 2008. *Subak Inspirasi Manajemen Pembangunan Pertanian*. Denpasar: Citra Budaya.
- Sumarti, Titik. 2007. "Kemiskinan Petani dan Strategi Nafkah Ganda Rumahtangga Pedesaan". *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*. Vol. 01, No. 02.
- Sumarwan, A. 2005. "Membongkar yang Lama, Menenun yang Baru", *Basis*, Nomor 11-12, November-Desember.
- Sumodiningrat. 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sunarto. 2000. Analisis Wacana Ideologi Gender Media Anak-Anak. Semarang: Mimbar Offset dan Yayasan Adikarya Ikapi.
- Suputra, Dewa Putu Arwan, Ambarawati, I.G.A.A dan Tenaya, I Made Narka, 2012. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alih Fungsi Lahan Studi Kasus di Subak Daksina, Desa Tibubeneng, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung", *E-Journal Agribisnis dan Agrowisata*, Vol. 1, No. 1.
- Surpa, I Wayan. 2011 "Implikasi Alih Fungsi Lahan terhadap Eksistensi Pura Subak dan Sosial Budaya Masyarakat di Kecamatan Denpasar Barat, Denpasar". *Disertasi* pada Program Studi Kajian Budaya, Universitas Udayana.

- Suryadi, A. 2002. "Memahami Life Skills". *Media Indonesia*, 14 Pebruari 2002.
- Sutawan, N. 2008. *Keberadaan PurapadaSubak*. Denpasar: Dinas Kebudayaan Propinsi Bali.
- Sutha, I Gusti Ketut, 1988, "Ekstensi Serta Peranan Hukum Adat di Indonesia" *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar di Fak. Hukum UNUD*, Denpasar.
- Suwena, I Ketut, Ni Putu Ratna Sari dan I G. P. Bagus S. Mananda. 2012. "Studi Tentang Arah Perubahan Subak Muwa Sebagai Akibat Perkembangan Sarana Kepariwisata Di Kelurahan Ubud-Gianyar". Laporan Penelitian Dosen Muda, Industri Perjalanan Wisata Fakultas Pariwisata Universitas Udayana.
- Swellengrebel, J.L. 1960. Bali, Some General Information. Dalam *Bali: Studies in life, Thought and Ritual*. The Hague: W. Van Hoeve.
- Sztompka, Piotr. 2008. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Prenada.
- Takwin, Bagus, 2009. *Akar-Akar Ideologi: Pengantar Kajian Konsep Ideologi dari Plato hingga Bourdieu*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Tewney, R.H. 1966. *Land and Labor in China*, Boston : Beacon Press.
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 2i*. Magelang: Tera Indonesia.
- _____. 2003. *Kekuasaan & Pendidikan*. Magelang: Tera Indonesia.
- Turasih, Soeryo Adiwibowo. 2012. "Sistem Nafkah Rumah Tangga Petani Kentang Di Dataran Tinggi Dieng (Kasus Desa Karangtengah, Kecamatan Batur, kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah)". *Jurnal Sodality*. Vol. 6, No. 2, hlm. 196-207
- Utari, N.K.S. 2006. "Mengikis Ketidakadilan Gender Dalam Adat Bali". Temu Ilmiah II Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berspektif Gender Se Indonesia (APPHGI). Surabaya.
- Warsana S.P. 2008. "Strategi Untuk Melakukan Penyuluhan Pertanian Untuk Petani Kecil." *Tabloid Sinar Tani*. Edisi 9 Januari 2006.

- Weber, M. 1958. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. (Translated by Talcott Parsons). New York: Charles Scribner's Sons.
- White R.E., 1995. *Introduction to the Principles and Practices of Soil Science*. Blackwell Scientific Publ, Palo Alto, CA.
- Wiasti, N.M. 2008. "Gender dan Kesetaraan dan Keadilan Gender: Studi tentang Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Bali". *Jurnal Studi Jender Srikandi*, Vol. 7, No. 1.
- Widja. I G. 1989. "Bali and Its Society: Continuity and Change". *Makalah*. Disampaikan di Sin Petersburg University, Florida, USA.
- _____. 2001. *Menuju Wajah Baru Pendidikan Sejarah: Suatu Perspektif dalam Menyongsong Tatanan Baru Kehidupan Berbangsa*. Singaraja: IKIP Negeri Singaraja.
- Windia, Wayan P. dan Sudantra, I Ketut, 2016, *Pengantar Hukum Adat Bali*, Swasta Nulus, Denpasar.
- Wingarta, P.S. 2006. *Bali Ajeg. Ketahanan Nasional di Bali Konsepsi dan Implementasinya*. Jakarta: Grafika Indah.
- Woods, Michael. 2003. "Deconstructing Rural Protest: The Emergence of a New Social Movement", *Journal of Rural Studies* 19, hlm. 309-325.
- Yadav. Jai Singh. 1998. "Seni dan Filosofi Bangunan Candi di Indonesia-India". Dalam *Candi sebagai Warisan Seni dan Budaya Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Cempaka Kencana.
- Yoga, Pradipta. 2006. *Pengikisan Budaya dan Kearifan Lokal Kearifan Modernisasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Young, Iris Marion. 2005. "Lived Body versus Gender: Reflections on Social Structure and Subjectivity." In *On Female Body Experience: "Throwing Like a Girl" and Other Essays*. New York: Oxford University Press.
- Zoetmulder, P.J. 1995. *Kamus Jawa Kuno*. Jakarta: Gramedia.
- Zohar, Danah, dan Marshall, Ian. 2004. *SQ: Memanfaatkan Kecerdasan Spiritual Dalam Berfikir Integralistik Dan Holistik Untuk Memaknai Kehidupan*. Jakarta: Pustaka Mizan, 2001.

PENYUSUTAN LAHAN PERSAWAHAN DI KOTA DENPASAR



Penyusutan lahan persawahan terjadi disebabkan karena berubahnya nilai lahan (rent) yang menyebabkan lahan dapat memberikan manfaat kepada manusia, Harga lahan yang tinggi menyebabkan lahan tersebut cenderung digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan menguntungkan, jika pada awalnya suatu lahan digunakan untuk kegiatan yang kurang produktif, maka

perubahan kegiatan yang dilakukan di atas lahan tersebut akan mempengaruhi nilai lahan menjadi lebih tinggi.

Penyusutan lahan persawahan terjadi disebabkan karena berubahnya nilai lahan (rent) yang menyebabkan lahan dapat memberikan manfaat kepada manusia, Harga lahan yang tinggi menyebabkan lahan tersebut cenderung digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif dan menguntungkan, jika pada awalnya suatu lahan digunakan untuk kegiatan yang kurang produktif, maka perubahan kegiatan yang dilakukan di atas lahan tersebut akan mempengaruhi nilai lahan menjadi lebih tinggi.

Data menunjukkan bahwa telah terjadi penyusutan lahan persawahan, pada kurun waktu tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 6,41%, pada tahun 2014 mengalami penurunan atau penyusutan 0.19%. Sedangkan untuk lahan pertanian berupa tegal/huma pada tahun 2012 mengalami penyusutan sebesar 20,43%.

Penyusutan terjadi dikarenakan hampir semua tanah sawah sudah beralih fungsi menjadi bangunan toko, rumah, sekolah, karaoke dan sebagainya. Penyusutan lahan persawahan terjadi tidak hanya disebabkan oleh factor eksternal atau desakan bisnis saja, namun factor internal dari petani sendiri. Akibat kontribusi sektor pertanian terhadap ketahanan pangan dari tahun ke tahun semakin kecil.

Sektor pertanian menjadi kurang menarik dibanding sektor industri lainnya, di samping kurang memperoleh perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah. Sektor pertanian semakin termarginalkan padahal sektor ini sangat tangguh bertahan dalam menghadapi gejolak ekonomi dunia. Konsekuensi logisnya adalah sektor pertanian yang merupakan salah ciri Indonesia sebagai negara agraris semakin terdegradasi, termasuk para petani yang belum siap untuk bersaing di dunia modern dan industri yang sangat kompetitif

ISBN 978-623-315-303-4



9 786233 153034



pena persada